

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI
DAN PELAYANAN UMUM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI JAMBI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

OLEH:

DEVA ANGRAINI

1600860201008

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

NAMA : DEVA ANGRAINI
NIM : 1600860201008
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG EKONOMI DAN PELAYANAN UMUM
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAMBI

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di Uji Skripsi dan Komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

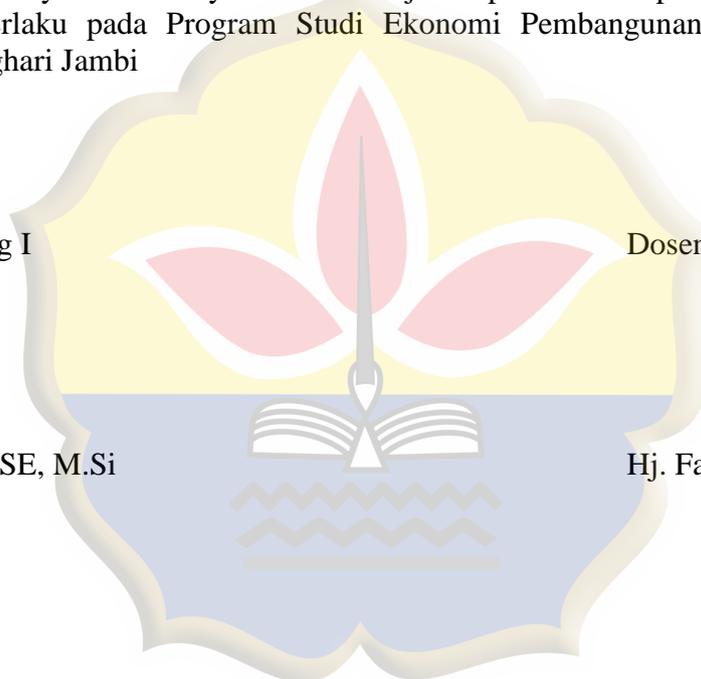
Jambi, Maret 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. M.Zahari MS, SE, M.Si

Hj. Fathiyah, SE, M,Si



Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Hj. Susilawati SE, M.Si

TANDA PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan Komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi Pada:

HARI : Sabtu
TANGGAL : 15 Februari 2020
JAM : 11.00 – 13.00 WIB
TEMPAT : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

PANITIA PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Sudirman SE, M.E.I	Ketua	1.
2. Hj. Fathiyah, SE, M.Si	Sekretaris	2.
3. Hj. Susilawati, SE, M.Si	Penguji Utama	3.
4. Dr. M.Zahari MS, SE, M.Si	Anggota	4.



Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan

Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.AK, AK, CA

Hj. Susilawati, SE, M.Si

LEMBARPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVA ANGRAINI

Nim : 1600860201008

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul : PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG EKONOMI DAN PELAYANAN UMUM
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI JAMBI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinil bukan plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi pembangunan fakultas ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Maret 2020

Yang membuat pernyataan

DEVA ANGRAINI

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dIketahui manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13)

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin..

Rasa syukur ku ucapkan atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku Ya Allah dan atas segala pertolonganmu, engkau berikan aku kesehatan dan ilmu sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku.

Aku persembahkan karya kecil ini:

Teruntuk yang selalu menjadi kebanggaanku, yang amat aku hormati dan cintaiku yaitu kedua orangtuaku ibu anita dan ayah ishak. Tiada henti aku bersyukur karena terlahir dari orangtua seperti kalian. Terimakasih ibu, ayah telah membesarkanku dengan penuh perjuangan dan selalu menjadi pelindungku, selalu memberikan kasih sayang tulus tanpa batas, selalu memberikan dukungan semangat agar aku menjadi pribadi yang kuat dan sabar, tiada lelah kalian memberian nasihat dan mendidik agar aku menjadi pribadi yang baik serta selalu menendoakan kesuksesan dan kebahagiaan untuk anakmu dalam setiap sholatmu. Tiada henti dan habisnya aku ucapkan terimakasih ayah ibu atas segala jasa yang Tak akan mampu anakmu ini untuk menggantikan dan membalasnya.

Teruntuk adik-adikku tersayang Yuda Ramadhan dan Dony Ahmad yang selalu menjadi penyemangat hdiupku dan seluruh keluarga atas segala dukungan doa dan nasihat baik yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan puji syukur atas kehadiran tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI DAN PELAYANAN UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW, orang tua dan saudara-saudara saya yang selama ini telah memberikan dorongan moril dan material serta do'a yang tulus.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Facruddin Razi,SH,MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, S.E.,M.Ak.,Ak,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati S.E.M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si selaku dosen pembimbing I yang selalu menerrima dengan baik dan sabar dalam meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan bantuan, masukan, saran, solusi, motivasi dan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Hj. Fathiyah, SE,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan masukan, saran, solusi dan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi .
6. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.E.I selaku penguji skripsi yang banyak memberikan bantuan, keumadahan, kritikan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Hj. Susilawati, SE, M.Si selaku penguji skripsi yang banyak memberikan bantuan, kemudahan ,kritikan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar aktivitas penulis selama mengikuti perkuliahan.

9. Kepada Beasiswa Bidikmisi yang telah memberikan kontribusi besar dalam finansial untuk menunjang pendidikan saya dari semester awal hingga akhir, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Sahabat yang sudah seperti saudaraku Setia Panjaitan, terimakasih selalu bersamaku terutama di masa sulitku selama proses penyelesaian skripsiku, yang tiada henti selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan bantuan untukku, selalu menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah skripsiku. Selalu menjadi penghibur kala aku sedih dan selalu ada menemani kala aku susah. Terimakasih telah menjadi sahabat dan saudara terbaik yang hebat.
11. Sahabat-sahabatku Riskiya, Rika, Saknaria dan Sylvia yang selalu menemani di setiap masa-masa perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-per satu yang telah memberikan bantuan-bantuan agar terselesainya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2020

Deva Angraini

ABSTRAK

(DEVA ANGRAINI/1600860201008/Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi / Pembimbing I Dr. M. Zahari, MS, SE, M.Si / Pembimbing II Hj Fathiyah, SE, MM.)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur kemajuan perekonomian masyarakat di suatu negara dan daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah berperan penting untuk melakukan berbagai kebijakan seperti salah satunya kebijakan fiskal terkait dengan pengeluaran pemerintah guna membiayai kegiatan dan pembangunan terutama bidang ekonomi dan pelayanan umum guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan bantuan *Program Eviews 8*. Sampel dalam penelitian terdiri dari 11 Kabupaten/Kota selama 5 tahun dari tahun 2014-2018.

Hasil penelitian dengan menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hasil estimasi *Fixed Effect Model* diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R Squared) sebesar 72.51% variasi variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sedangkan sisanya sebesar 27.49% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model estimasi.

Kata Kunci: Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

(DEVA ANGRAINI / 1600860201008 / The Effects of Government Expenditures on Economics and Public Services on Economic Growth in Jambi Province / Supervisor I Dr. M. Zahari, MS, SE, M.Sc / Supervisor II Hj Fathiyah, SE, MM.)

Economic growth is one of the economic progress indicators of a country and region. To increase economic growth, the government plays an important role in carrying out various policies such as fiscal policies related to government spending to finance activities and development, especially in the economic sector and public services in order to encourage economic growth in the regions concerned.

The purpose of this study is to analyze the effect of government spending on the economy and public services on economic growth in Jambi Province. The research method uses quantitative methods and the types of data used in this study are secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The analytical tool used in this study is panel data regression analysis using the Fixed Effect Model with the help of Eviews 8. The sample in this study consisted of 11 districts / cities for 5 years from 2014-2018.

The results of the study using the Fixed Effect Model estimation show that government spending in the economy and public services simultaneously have a significant effect on economic growth in Jambi Province. Government spending in the economy has a significant effect on economic growth in Jambi Province. Government spending on public services has no significant effect on economic growth in Jambi Province. The estimation result of Fixed Effect Model is obtained by the coefficient of determination (Adjusted R Squared) of 72.51% variation of government expenditure variables in the economy and public services can explain economic growth variables in Jambi Province, while the remaining 27.49% is influenced by other factors outside the estimation model.

Keywords: *Government expenditure in the economic field, government expenditure public service sector, economic growth.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
TANDA KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DATAR GAMBAR	x
DATAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	7
2.1. Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.1.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.1.1.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.1.1.2. Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.1.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	20
2.1.1.3.1. pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	21

2.1.1.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.1.2. Kerangka Pemikiran	23
2.1.3. Hipotesis.....	24
2.1.4. Penelitian Terdahulu	24
2.2. Metode Penelitian	25
2.2.1. Metode Penelitian yang digunakan.....	25
2.2.2. Jenis dan Sumber Data	25
2.2.3. Metode Pengumpulan Data	25
2.2.4. Metode Analisis Data	26
2.2.4.1. Analisis Kuantitatif	26
2.2.5. Alat Analisis Data	26
2.2.5.1. Analisis Regresi Data Panel	26
2.2.5.1.1. Model Estimasi Data Panel.....	27
2.2.5.1.2. Pengujian Model Data Panel	29
2.2.5.1.3. Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square).....	30
2.2.5.1.4. Pengujian Hipotesis	30
2.2.5.1.5. Uji Asumsi Klasik.....	31
2.2.6. Definisi Operasional Variabel.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM DI PROVINSI JAMBI	33
3.1. Keadaan Umum	33
3.2. Topografi	34
3.3. Potensi Daerah.....	35
3.4. Kondisi Kependudukan	37
3.5. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	38
3.6. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Hasil Penelitian.....	46
4.1.1. Hasil Estimasi Model Data Panel.....	46
4.1.1.1. Hasil <i>Common Effect</i> Model.....	46
4.1.1.2. Hasil <i>Fixed Effect</i> Model	47
4.1.1.3. Hasil <i>Random Effect</i> Model.....	48
4.1.2. Hasil Pengujian Model Data Panel.....	49
4.2.1. Uji Chow.....	49
4.2.2. Uji Hausman	50
4.1.3. Hasil Persamaan Regresi Data Panel	51
4.1.4. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R ²) dan Korelasi (R).....	56
4.1.5. Hasil Pengujian Hipotesis.....	57
4.1.5.1. . Secara Simultan (Uji F-Statistik).....	57
4.1.5.2. . Secara Parsial(Uji t-Statistik).....	58
4.2. Analisis Dan Pembahasan	59
4.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	59
4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	59
4.2.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	60
4.3. Implikasi Kebijakan.....	62
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	2
Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Dan Pelayanan Umum di Provinsi Jambi.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel	32
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.....	34
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2018	37
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018	39
Tabel 3.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018	42
Tabel 3.5 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018	44
Tabel 4.1 Hasil <i>Common Effect Model</i>	46
Tabel 4.2 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	47
Tabel 4.3 Hasil <i>Random Effect Model</i>	48
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Chow</i>	49
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Hausman</i>	50
Tabel 4.6 Hasil Persamaan Regresi dengan <i>Fixed Effect Model</i>	51

DAFTAR GAMBAR

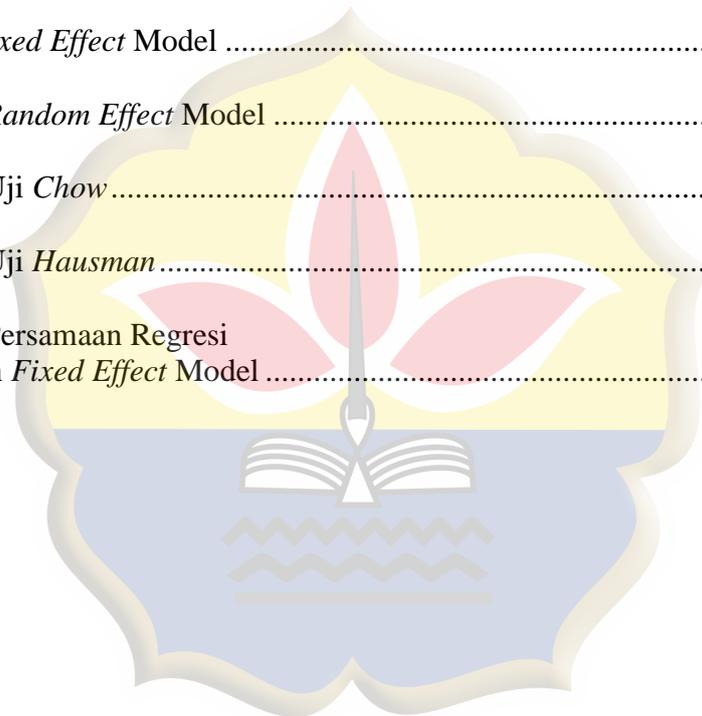
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....23

Gambar 3.1 Peta Provinsi Jambi.....33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Data Mentah Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.....	68
Lampiran 2 Data Mentah Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018	69
Lampiran 3 Hasil Data Logaritma Natural Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018	83
Lampiran 4 Hasil <i>Commonf Effect</i> Model	85
Lmpiran 5 Hasil <i>Fixed Effect</i> Model	86
Lampiran 6 Hasil <i>Random Effect</i> Model	87
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Chow</i>	88
Lampiran 8 Hasil Uji <i>Hausman</i>	89
Lampiran 9 Hasil Persamaan Regresi dengan <i>Fixed Effect</i> Model	90





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2006:22) pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial-ekonomi, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2017:9). Sedangkan Mankiw (2006), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode atau tahun tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil yang diharapkan akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah, oleh karena itu hampir setiap daerah selalu berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ukuran pertumbuhan ekonomi bisa dilihat melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

untuk regional/daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perkembangan (%)
2014	7,76	-
2015	4,21	(45,75)
2016	4,37	3,80
2017	4,64	6,17
2018	4,71	1,51
Rata-Rata	5,14	(8,57)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1.1 data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan. Pada awal tahun 2014, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76 persen, kemudian di tahun 2018 menurun menjadi sebesar 4,71 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi peran pemerintah sangat penting untuk melakukan berbagai kebijakan melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan salah satunya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328). Dalam menentukan komposisi APBN inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah pada penelitian ini hanya ditinjau dibidang ekonomi dan pelayanan umum. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi adalah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk sektor perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal , ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah;pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah;perangkat daerah; kepegawaian dan persandian, kepegawaian ,komonukasi dan informatika. Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Provinsi Jambi, selama tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanann umum di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PPBE	PPBPU	TOTAL PP	PORSI (%)	
				PPBE	PPBPU
2014	Rp 333.851.498.810	Rp 1.915.225.428.823	Rp 3.679.159.000.000	9,07	52,06
2015	Rp 207.479.129.772	Rp 224.119.292.170	Rp 3.604.245.000.000	5,76	6,22
2016	Rp 362.025.912.627	Rp 1.416.496.577.169	Rp 3.381.884.000.000	10,70	41,88
2017	Rp 285.572.962.242	Rp 1.105.479.725.397	Rp 4.583.486.000.000	6,23	24,12
2018	Rp 316.567.799.202	Rp 1.165.578.096.098	Rp 4.515.144.000.000	7,01	25,81
Rata-Rata				7,76	30,02

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2 pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan. Pada awal tahun 2014, pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 3.68 triliun, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp. 4.52 triliun. Porsi pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan cenderung menurun, dimana pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum pada tahun 2014 sebesar 52,06 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 25,81 persen. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi porsinya juga cenderung menurun dimana pada tahun 2014 sebesar 9,07 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 7,01 persen.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah terutama kebijakan dalam mengalokasikan anggaran atau belanja guna pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003:257), kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan Y_1 ke Y_2 kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan belanja pemerintah (ΔG). Jadi kebijakan fiskal berupa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan Zahari (2017) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun Tahun 2010-2016 yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.
2. Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi pada tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.
3. Pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum pada tahun 2014-2018 di Provinsi Jambi berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidanya pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah khususnya pada bidang ekonomi dan pelayanan umum.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pengalokasian anggaran atau pengeluaran pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu indikator yang amat penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut Sukirno (2010:9-10) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan tingkat perubahan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan GNP yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Murni, 2013:171). Kuznets dalam (Jhingan,2012:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan semakin kondisi perekonomian masyarakat semakin berkembang di daerah tersebut. Kuznets dalam (Todaro, 2003:99) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- a) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

- b) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
- c) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Dalam konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro suatu negara, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Kuncoro,2004:115).

Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan nasional yang merujuk pada PDB dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya, perlu didasari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional PDB dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Rumusan perhitungan pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2002:19) adalah:

$$LPE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

LPE : pertumbuhan ekonomi atas dasar perubahan PDB (%)

PDB_t : nilai PDB tahun t

PDB_{t-1} : nilai PDB tahun sebelumnya

PDRB atas dasar harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga diukur melalui pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional ini dengan cara pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen yaitu: konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan export neto yaitu ekspor dikurangi import (Sukirno,2008:37). Dari komponen yang mempengaruhi pendapatan nasional tersebut dapat dilihat peran pengeluaran pemerintah juga ikut berperan dalam menentukan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.1.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001:250-253) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Namun disisi lain, bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin angkatan kerja adalah satu-satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam meliputi tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air dan mineral. Banyak negara-negara lain seperti Norwegia

dan Kanada memiliki pendapatan yang tinggi karena sumber daya alam mereka. Namun kepemilikan sumber daya alam ini bukan merupakan keharusan yang dimiliki oleh negara untuk menjamin keberhasilan perekonomian di dunia modern. Contohnya saja negara Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam namun dapat berkembang pesat dengan memusatkan perhatian kepada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal.

3. Akumulasi modal (pembentukan modal)

Akumulasi modal menghendaki pengorbanan konsumsi selama beberapa tahun. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Barang-barang modal disini mencakup struktur-struktur seperti jalan dan pembangkit tenaga listrik, peralatan seperti truk dan komputer, dan persediaan barang/ *stock of inventories*.

4. Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi menjadi unsur yang vital dalam proses pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru. Penemuan proses yang sangat meningkatkan produktivitas adalah mesin uap, pembangkit listrik, dll. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi bukan sekedar merupakan prosedur mekanis untuk menemukan produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya, inovasi yang cepat memerlukan pemupukan semangat kewirausahaan.

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini merupakan investasi pemerintah yang menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. *social overhead capital* (SOC) sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas umum atau publik. Tersedianya fasilitas umum atau publik oleh pemerintah maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara maupun daerah yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti juga peningkatan pengeluaran pemerintah.

2.1.1.1.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori menurut para ahli yang mengemukakan mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Teori Klasik Adam Smith

Tokoh klasik ini dipelopori oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang dan modal dan teknologi yang digunakan. Menurut Sukirno (2006:247), teori pembangunan kaum

klasik dalam garis besarnya mengemukakan pandangan sebagai berikut:

- a) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada empat faktor yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b) Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu: upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah.
- c) Kenaikan upah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.
- d) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal, apabila tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
- e) Hukum hasil lebih yang semakin bekurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan, tanpa adanya kemajuan teknologi, penambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, akan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2. Teori Neo Klasik Sollow

Teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow melihat dari sudut pandang penawaran. Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pertumbuhan modal, penduduk dan teknologi. Sollow mengemukakan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan

tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sukirno, 2013:437).

3. Teori Keynesian

Menurut Keynes dalam buku Sukirno (2000:19), kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Komponen utama pembelajaan agregat ada empat yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran agregat. Dimana salah satu komponen agregat adalah pengeluaran pemerintah.

4. Teori Harrod-Domar

Apabila perkembangan ekonomi hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi senantiasa harus diperbesar, agar pertumbuhan pendapatan dapat cukup menjamin penggunaan kapasitas produksi secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh (Subandi, 2011:57). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu investasi yang diberikan oleh pemerintah dalam mendorong pendapatan nasional.

2.1.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2009:12) . Pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat. Akan tetapi pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Kerap kali pemerintah membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat (Sukirno,2006:87). Pengeluaran atau belanja agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu dan biasanya diukur untuk suatu tahun tertentu (Sukirno,2007:95). Pengeluaran pemerintah (G) adalah semua pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah (Boediono,2013:50).

Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan ke dalam belanja negara. Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu melalui *Income approach* (melalui pajak) dan

expenditure approach (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekenomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw,2013:328). Dalam menentukan komposisi APBN inilah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional (Dumairy, 1996:157).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan mikro (Mangkoesoebroto,1994:169).

1. Pengeluaran pemerintah secara makro

pengeluaran pemerintah secara makro adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori makro mengenai

perkembangan pemerintah dibagi ke dalam tiga golongan (Mangkoesoebroto, 1994:169), yaitu:

- a) Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. tahap awal perkembangan ekonomi, dimana investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Tahap menengah pembangunan ekonomi, peran pemerintah masih diperlukan tetapi peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah tetap besar karena peranan swasta yang semakin banyak ini menimbulkan kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang publik dalam jumlah kualitas yang lebih baik. Pada tahap tingkat ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya.
- b) Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GDP yang didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang. Hukum Wagner berisi apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum

Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

c) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat besarnya pengeluaran pemerintah ini maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara.

Model pembangunan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi baik pada tahap awal, menengah maupun akhir. Hukum Wagner berisi teori bahwa pendapatan per kapita yang semakin meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Kemudian teori Peacock dan Wiseman mengungkapkan bahwa dalam keadaan normal,

mningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah akan semakin besar pula. Dari beberapa teori tersebut dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi GDP serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Pengeluaran pemerintah secara mikro

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Menurut Mangkoesobroto (1994: 177-178) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik meenentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulus pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor dibawah ini:

- a) Perubahan permintaan akan barang publik
- b) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinaifaktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
- c) Perubahan kualitas barang publik
- d) Perubahan harga faktor-faktor produksi

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah belanja menurut urusan pemerintah, belanja menurut fungsi pemerintah, belanja menurut organisasi, belanja menurut program dan kegiatan, dan belanja menurut kelompok. Adapun belanja daerah menurut fungsi yang digunakan oleh pemerintah untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a) Belanja fungsi pelayanan umum adalah pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan atau perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari.
- b) Belanja fungsi ekonomi adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditujukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mempunyai *multiplier effect*.
- c) Belanja fungsi kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan dan gedung kesehatan.
- d) Belanja fungsi pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun gedung sekolah.
- e) Belanja fungsi ketertiban dan keamanan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mendukung ketahanan dan keamanan di daerah.

- f) Belanja fungsi pariwisata dan budaya ada pengeluaran pemerintah yang ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah, promosi serta sekaligus dalam rangka mempertahankan kelestarian budaya daerah.
- g) Belanja fungsi perlindungan atau jaminan sosial adalah pengeluaran untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana dan permasalahan sosial.

2.1.1.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003:257), kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan Y_1 ke Y_2 kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan belanja pemerintah (ΔG). Jadi kebijakan fiskal berupa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan. Nanga (2001:94) pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap permintaan agregat terhadap barang dan jasa yang selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Hukum Wagner mengemukakan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB yang didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

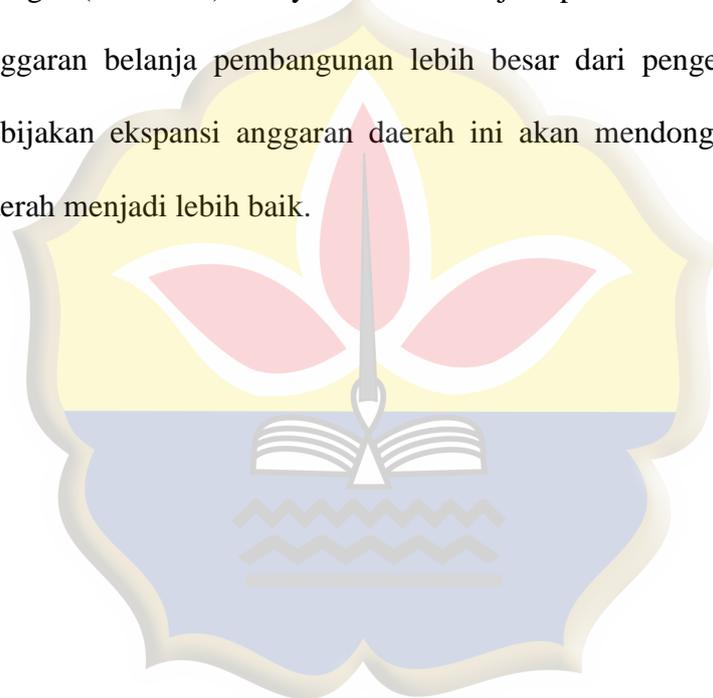
Sedangkan teori Peacock dan Wiseman berisi tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Menurut mereka meningkatnya pendapatan nasional menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar (Mangkoesoebroto, 1994:171-174).

2.1.1.3.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang dan jasa (Sukirno, 2015:97). Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan barang atau jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat atau swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Subandi, 2014: 88).

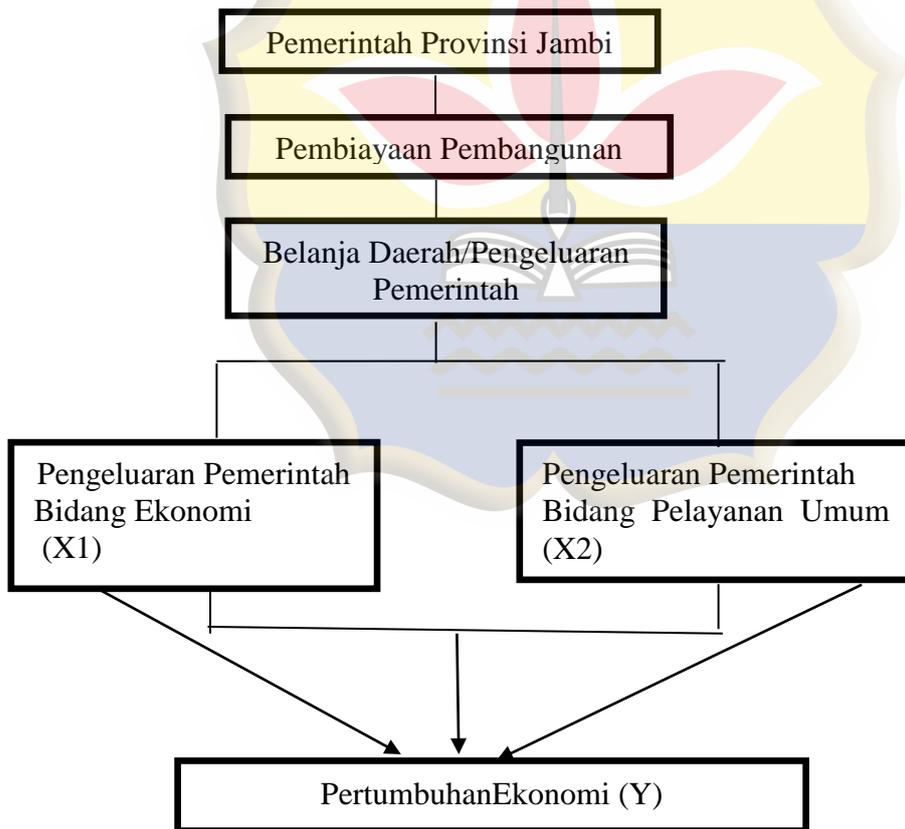
2.1.1.3.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuncoro (2004:90) belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan disini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah. Saragih (2003:115) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak perekonomian daerah menjadi lebih baik.



2.1.2. Kerangka Pemikiran

Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Dalam perekonomian terutama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan daerah, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan berbagai kebijakan guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. kebijakan pemerintah disini yaitu kebijakan dalam mengalokasikan belanja daerah atau pengeluaran pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan salah satunya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. belanja daerah atau pengeluaran pemerintah pada penelitian ini hanya ditinjau pada bidang ekonomi dan pelayanan umum.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.1.3. Hipotesis

Dari permasalahan dan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa secara simultan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneiti/Judul	Metode Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Zahari, M. (2017) dalam Jurnal “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”.	Menggunakan data skunder. Dengan Alat analisis regresi linear <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) $Ln Pe_t = Ln\alpha + Ln\beta TBD_t + e$	Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Merri Anitasari dan Ahmad Soleh (2015) dalam Jurnal “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”.	Menggunakan Metode Kuantitatif. Dengan alat analisis regresi $Y = 4,734 + 2,968x$.	Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Kisra (2014) dalam Skripsi “Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya”.	Menggunakan data skunder. Dengan alat analisis Regresi Linear Sederhana $Y = a + b LnX + e$	Terdapat hubungan yang kuat antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Rusdiansyah, Muh (2014)	Menggunakan data	Pengeluaran

dalam Skripsi “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2000-2012.	<i>time-series.</i> Dengan alat analisis regresi linear berganda $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$	pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
--	---	--

2.2. Metode Penelitian

2.2.1. Metode Penelitian yang digunakan

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149).

2.2.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan adalah data sekunder antara lain adalah data pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk data panel, yaitu gabungan dari *time series* dan *cross section*, data *time series* adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dan *cross section* adalah data 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

2.2.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data diperoleh melalui dokumen yang di publikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

2.2.4. Metode Analisis Data

2.2.4.1. Analisis Kuantitatif

Metode Analisis Kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2.2.5. Alat Analisis

2.2.5.1. Analisis Regresi Data Panel

analisis regresi data panel yaitu penggabungan data *time series* dengan *cross section* untuk menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. sesuai dengan data panel dapat ditarik suatu model regresi sebagai berikut (Batalgi, 2005:11):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel terikat
 α : Intersep
 $X_1 - X_2$: Variabel Bebas
 $\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Regresi Variabel Bebas
 ε_{it} : Error Individu ke-i dan Periode ke-t
 i : Individu ke-t
 t : periode ke-t

persamaan tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk persamaan linear regresi berganda data panel yang sesuai dengan variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

$$\text{LnPE}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnPPBE}_{it} + \beta_2 \text{LnPPBPU}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

α	: Intersep
LnPE	: Pertumbuhan Ekonomi (persen)
$\beta_1 - \beta_2$: Kofisien pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum
LnPPBE	: Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi (Persen)
LnPPBPU	: Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum (Persen)
ε_{it}	: Error Individu ke-i dan Periode ke-t
i	: Individu Kabupaten/Kota
t	: periode Tahun 2014-2018

2.2.5.1.1. Model Estimasi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Menurut Basuki dan Prawoto (2016:276-279) ketiga model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.5.1.1.1. *Common Effect Model* (CEM)

Common effect model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data

perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan regresi untuk pendekatan *common effect* model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it} \beta + \varepsilon_{it}$$

2.2.5.1.1.2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengamsusikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya, dimana setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Persamaan regresi yang digunakan untuk pendekatan *Fixed Effect* model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X_{it} \beta + \varepsilon_{it}$$

2.2.5.1.1.3. *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin tidak saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Metode yang tepat mengakomodasi model *Random Effect* ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*, dengan asumsi komponen *error* bersifat homokedastik dan tidak ada gejala *cross sectional correlation*. Persamaan regresi yang digunakan untuk pendekatan *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it} \beta + w_{it}$$

2.2.5.1.2. Pengujian Model Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat yang akan dipergunakan untuk model regresi dengan menggunakan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang tepat dilakukan, antara lain:

2.2.5.1.2.1. Uji *Chow*

Uji ini dilakukan untuk menentukan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data *panel*. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan program Eviews 8. Hipotesis yang digunakan dalam Uji *Chow* adalah:

H₀ : *Common Effect* Model

H₁ : *Fixed Effect* Model

Jika nilai probabilitas $F < \alpha = 0.05$ artinya H₀ ditolak H₁ diterima, maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect* Model. Sebaliknya, Jika nilai probabilitas $F \geq 0.05$ artinya H₁ ditolak H₀ diterima, maka model yang digunakan adalah *Common Effect* Model.

2.2.5.1.2.2. Uji *Hausman*

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan program Eviews 8. Hipotesis yang digunakan dalam Uji *Hausman* adalah:

H₀ : *Random Effect* Model

H₁ : *Fixed Effect* Model

Jika nilai probabilitas Chi-Square $< \alpha = 0.05$ artinya H_0 ditolak, maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sebaliknya, Jika nilai probabilitas Chi-Square $> \alpha = 0.05$ artinya H_0 diterima, maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model*.

2.2.5.1.3. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel *independen* (pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum) mampu menjelaskan variabel *dependen* (pertumbuhan ekonomi). Apabila *Adjusted R-Square* semakin mendekati satu maka akan semakin baik, yang artinya *independen* (pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum) yang digunakan mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen* (pertumbuhan ekonomi).

2.2.5.1.4. Pengujian Hipotesis

2.2.5.1.4.1. Secara Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen (bebas) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas $F < \alpha = 0,05$ dengan tingkat keyakinan 95 persen maka H_0 ditolak, artinya variabel independen (bebas) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (terikat).

2.2.5.1.4.2. Secara Parsial (Uji t-Statistik)

Uji t merupakan pengujian hubungan regresi secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas $t < \alpha = 0,1$ persen dengan tingkat keyakinan 90 persen maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat)

2.2.5.1.5. Uji Asumsi Klasik

Selain melihat kriteria statistik sebagai evaluasi hasil analisis regresi, terdapat juga kriteria regresi ekonometrik yang juga penting untuk diperhatikan yaitu menyangkut pelanggaran asumsi klasik. Namun, Uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas, lebih banyak degree of freedom dan lebih efisien (Gujarati,2012:237).

2.2.6. Definisi Operasional Variabel

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian penafsiran variabel penelitian yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa pengertian dasar atau konsep operasional variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel

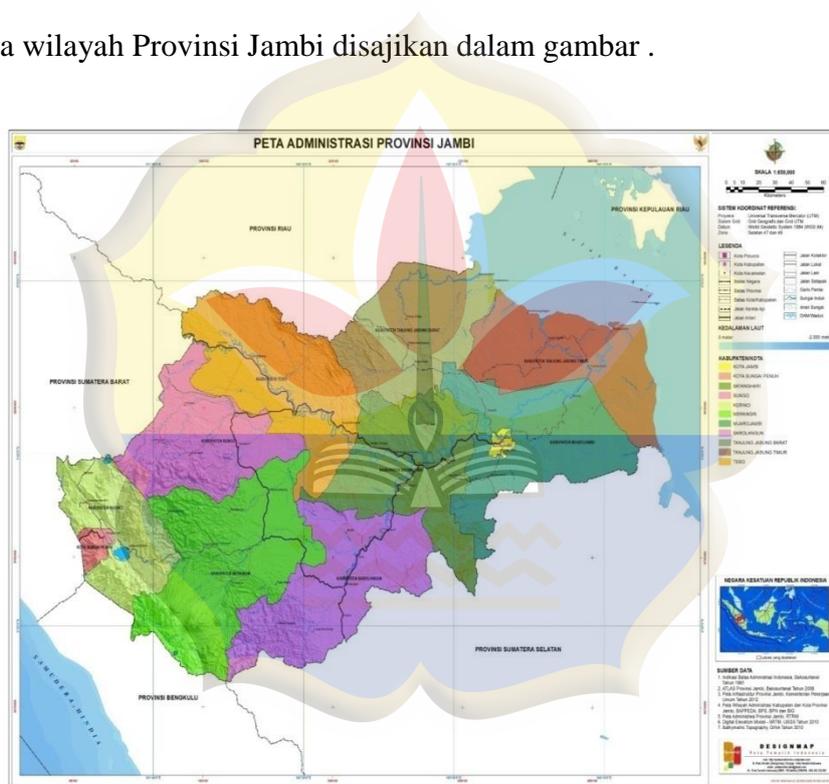
No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Merupakan nilai yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan PDRB ADHK, Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2014-2018.	Persen
2	Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (X1)	Merupakan realisasi anggaran belanja daerah fungsi ekonomi dalam APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tahun 2006	Rupiah
3	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum (X2)	Merupakan realisasi anggaran belanja daerah fungsi pelayanan umum dalam APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tahun 2006	Rupiah

BAB III

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI

3.1. Keadaan Umum

Provinsi Jambi secara resmi dibentuk pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958. Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara $0^{\circ} 45' \text{ LS}$ - $2^{\circ} 45' \text{ LS}$ dan $101^{\circ} 10' \text{ BT}$ - $104^{\circ} 55' \text{ BT}$. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Peta wilayah Provinsi Jambi disajikan dalam gambar .



Gambar 3.1 Peta Provinsi Jambi

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km^2 dengan luas daratan 50.160 Km^2 dan luas perairan sebesar $3.274,95 \text{ Km}^2$. Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten atau kota yaitu yang ditunjukkan pada tabel 3.1 Klasifikasi 11 Kabupaten/kota dan luas wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Persentase)
1	Kabupaten Kerinci	4200 (7,86%)
2	Kabupaten Merangin	6.380 km ² (11,94%)
3	Kabupaten Sarolangun	7.820 km ² (14,63%)
4	Kabupaten Batanghari	4.983 km ² (9,33%)
5	Kabupaten Muaro Jambi	6.147 km ² (11,50%)
6	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5.330 km ² (19,97%)
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.870 km ² (9,11%)
8	Kabupaten Tebo	6.340 km ² (11,86%)
9	Kabupaten Bungo	7.160 km ² (13,40%)
10	Kota Jambi	205,38 km ² (0,39%)
11	Kota Sungai Penuh	391,5 km ² (0,15%)
Provinsi Jambi		53.435 (100,00)

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 3.1 dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Jambi yang member dampak terhadap penciptaan lapangan kerja (kesempatan kerja) yang juga dipengaruhi dengan adanya sistem pemerintahan yang baru yang memiliki program kerja yang direncanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari wilayah yang mengalami pemekaran. Hal ini didukung oleh program pemerintahan yang bersifat *bottom up* yaitu otonomi daerah, dimana program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dimasyarakat maupun di sektor publik.

3.2. Topografi

Provinsi Jambi dengan luas 53.435 km, dibagi menjadi tiga satuan topografi yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan.

1. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-100 km, merupakan daerah yang terluas, kira-kira 67,21% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Rawa-rawa banyak dijumpai di daerah ini, luas rawa-rawa hampir setengah dari luas dataran rendah seluruhnya. Daerah dataran rendah terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bangko.

2. Dataran tinggi merupakan peralihan dari dataran rendah ke arah pegunungan meliputi daerah berbukit-bukit dengan ketinggian 100-500 m dari permukaan laut. Luasnya sekitar 18,04% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Daerah dataran tinggi terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bangko, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan sebagian dari Kabupaten Batanghari.
3. Daerah pegunungan merupakan bagian dari bukit barisan dengan ketinggian antara 500-3800 m dari permukaan laut. Luasnya sekitar 14,74% dari luas wilayah Provinsi Jambi yang meliputi Kabupaten Kerinci dan sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bangko.

3.3. Potensi Daerah

Dengan telah beroperasinya jalur lintas Timur Sumatera seluruh wilayah Jambi telah terangkai ke dalam suatu sistem transportasi darat yang menghubungkan pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga aksesibilitas daerah Jambi melalui jalan darat semakin baik. Provinsi Jambi sebagai produsen komoditas pertanian semakin dekat dengan pasar potensial yaitu Pulau Jawa dan provinsi lainnya yang berdekatan dengan daerah Jambi.

Sebagai tindak lanjut telah terangkainya Provinsi Jambi kedalam jalur transportasi darat yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tersebut, maka pusat-pusat produksi dari kegiatan ekonomi di Provinsi Jambi dapat terangkai dalam suatu rangkaian distribusi regional dan nasional secara efisien. Dengan demikian perkembangan seluruh wilayah Provinsi Jambi yang lebih merata dapat terangsang melalui perdagangan antar daerah dan Provinsi. Dalam jangka panjang, setelah jalan darat ini dilengkapi dengan sarana perhubungan laut, wilayah Jambi akan semakin dekat dengan pusat-pusat pasar yang akan lebih memacu kegiatan perekonomian Provinsi Jambi.

Hampir seluruh kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi tercakup dalam kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang terbentang dari Kabupaten Kerinci sampai Laut Cina Selatan. Di dalamnya tersedia sumber air sepanjang tahun, yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai air irigasi pertanian, media budidaya air tawar, maupun air baku bagi kebutuhan rumah tangga, industry dan sarana transportasi. Pemanfaatan air ini masih terbuka peluang lebar untuk jenis kegiatan lainnya. Seperti pariwisata.

Potensi yang ada di Provinsi Jambi juga ditemui dan hutan lindung dan konservasi yang menyimpan sumber daya hayati dan mineral yang besar. Sebagai contoh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) masih menyimpan tanaman yang berusia ratusan tahun dan hewan yang langka potensi lainnya adalah letak sebagian daerah di Provinsi Jambi yang berada di kawasan pantai Timur Pulau Sumatera sangat kaya dengan sumber daya laut yang berpeluang besar untuk dieksploitasi bagi peningkatan dan perkembangan ekonomi.

Potensi lainnya yang sangat besar adalah ditemukannya cadangan minyak dan gas bumi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi dan Kota Jambi yang hingga saat ini belum mampu dilakukan eksploitasi secara besar-besaran. Penemuan cadangan batubara di Kabupaten Bungo dan tenaga panas bumi di Kabupaten Kerinci. Potensi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Provinsi Jambi ke depan, terlebih kawasan Provinsi Jambi sangat dekat dengan daerah pusat pertumbuhan Singapura, Batam, dan Johor.

3.4. Kondisi Kependudukan

Penduduk Provinsi Jambi tahun 2018 berjumlah 3.570.272 jiwa yang terdiri dari jiwa 1.821.381 penduduk laki-laki dan 1.748.891 jiwa penduduk perempuan. Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 598.103 jiwa (BPS,2018). Besarnya jumlah penduduk di Kota Jambi didorong oleh peranannya sebagai ibukota Provinsi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di
Provinsi Jambi Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kerinci	118.656	119.135	237.791
2	Merangin	196.265	187.215	383.480
3	Sarolangun	150.732	145.253	295.985
4	Batanghari	137.686	132.280	269.966
5	Muaro Jambi	223.309	208.996	432.305
6	Tanjabtim	112.118	106.295	218.413
7	Tanjabbar	170.045	158.298	328.343
8	Tebo	179.709	169.051	348.760
9	Bungo	187.677	179.505	367.182
10	Kota Jambi	300.566	297.537	598.103
11	Kota Sungai Penuh	44.618	45.326	89.944
Provinsi Jambi		1.821.381	1.748.891	3.570.272
Rata-Rata		165.580	158.990	324.570

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pada tabel 3.2 dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi sebanyak 1.821.381 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.748.891 jiwa.

Terdapat 6 kabupaten/kota yang jumlah penduduk laki-lakinya diatas rata-rata jumlah penduduk provinsi, yaitu Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 300.566 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 223.309 jiwa, Kabupaten Merangin sebanyak 196.265 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 187.677 jiwa, Kabupaten Tebo sebanyak 179.709 jiwa, dan Kabupaten Tanjabbar sebanyak 170.045 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk laki-laki dibawah rata-rata yaitu, Kabupaten Sarolangun dengan penduduk

sebanyak 150.732 jiwa, Kabupaten Batanghari sebanyak 137.686 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 118.656 jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 112.118 jiwa dan Kota Sungai Penuh sebanyak 44.618 jiwa.

Terdapat 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi sebanyak 297.537 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 208.996 jiwa, Kabupaten Merangin sebanyak 187.215 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 179.505 jiwa, dan Kabupaten Tebo sebanyak 169.051 jiwa. Sedangkan kabuapten/kota yang memiliki jumlah penduduk perempuan di bawah rata-rata terdapat 6 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 158.298 jiwa, Kabupaten Sarolangun sebanyak 145.253 jiwa, Kabupaten Batanghari sebanyak 132.280 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 119.135 jiwa, dan Kota Sungai Penuh sebanyak 45.326 jiwa.

3.5. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif atau mengalami peningkatan dianggap dapat menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat daerah tersebut berkembang dengan baik. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berfluktuatif pada setiap periode dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3.3:

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kerinci	9,06	6,45	6,70	6,03	5,10	6,67
2	Merangin	7,13	5,48	6,21	5,55	5,17	5,91
3	Sarolangun	5,20	3,09	4,26	4,69	4,72	4,39
4	Batanghari	7,56	4,36	4,55	4,82	4,96	5,25
5	Muaro Jambi	8,03	5,24	5,43	5,06	5,27	5,81
6	Tanjabtim	5,81	1,87	2,70	3,13	3,13	3,33
7	Tanjabbar	5,85	3,98	3,14	4,25	6,89	4,82
8	Tebo	8,83	5,28	5,38	5,60	5,02	6,02
9	Bungo	6,74	5,13	5,20	5,67	4,72	5,49
10	Kota Jambi	8,17	5,56	6,81	4,68	5,48	6,14
11	Kota Sungai Penuh	7,54	7,06	6,51	6,24	5,54	6,58
Rata-Rata		7,26	4,86	5,17	5,07	5,09	5,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sangat bervariasi. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 9,06 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Tebo sebesar 8,83 persen, lalu Kota Jambi sebesar 8,17 persen, lalu Kabupaten Muaro Jambi sebesar 8,03 persen, lalu Kabupaten Batanghari sebesar 7,56 persen, lalu Kota Sungai Penuh sebesar 7,54 persen, lalu Kabupaten Merangin sebesar 7,13 persen, lalu Kabupaten Bungo sebesar 6,74 persen, lalu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 5,85 persen, lalu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5,81 persen, dan yang terakhir Kabupaten Sarolangun sebesar 5,20 persen.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Sungai Penuh sebesar 7,06 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Kerinci sebesar 6,45 persen, lalu disusul Kota Jambi sebesar 5,56 persen, lalu disusul Kabupaten Merangin sebesar 5,48 persen, lalu disusul Kabupaten Tebo sebesar 5,28 persen, lalu disusul Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,24 persen, lalu disusul Kabupaten Bungo sebesar 5,13 persen, lalu disusul Kabupaten Batanghari sebesar 4,36 persen, lalu disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebesar 3,98 persen, lalu disusul Kabupaten Sarolangun sebesar 3,09 persen, dan yang terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,87 persen.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Jambi sebesar 6,81 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Kerinci sebesar 6,70 persen, lalu disusul oleh Kota Sungai Penuh sebesar 6,51 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Merangin sebesar 6,21 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,43 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tebo sebesar 5,38 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Bungo sebesar 5,20 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Batanghari sebesar 4,55 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Sarolangun sebesar 4,36 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3,14 persen, dan yang terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 2,70 persen.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kota Sungai Penuh sebesar 6,24 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Kerinci sebesar 6,03 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Bungo sebesar 5,67 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tebo sebesar 5,60 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Merangin sebesar 5,55 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,06 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Batanghari sebesar 4,82 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Sarolangun sebesar 4,69 persen, lalu disusul Kota Jambi sebesar 4,68 persen, lalu disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 4,25 persen, dan yang terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,13 persen.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 6,89 persen, kemudian disusul oleh Kota Sungai Penuh sebesar 5,54 persen, lalu disusul oleh Kota Jambi sebesar 5,48 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,27 persen, lalu disusul Kabupaten Merangin sebesar 5,17 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Kerinci sebesar 5,10 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tebo sebesar 5,02 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Batanghari sebesar 4,96 persen, lalu disusul oleh

Kabupaten Sarolangun dan Bungo sebesar 4,72 persen, dan yang terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,13 persen.

Untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014-2018 adalah sebesar 5,49 persen, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tertinggi Kabupaten Kerinci sebesar 6,67 persen, kemudian disusul oleh Kota Sungai Penuh sebesar 6,58 persen, lalu disusul oleh Kota Jambi sebesar 6,14 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tebo sebesar 6,02, lalu disusul oleh Kabupaten Merangin sebesar 5,91 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,81 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Bungo sebesar 5,49 persen, lalu disusul Kabupaten Batanghari sebesar 5,25 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 4,82 persen, lalu disusul oleh Kabupaten Sarolangun sebesar 4,39 persen, dan terakhir oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 3,33 persen.

3.6. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran pemerintah pada suatu periode anggaran. Pengeluaran pemerintah sangat berperan penting dalam perekonomian suatu daerah terutama peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja. Alokasi anggaran belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah hendaknya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah juga mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai berkualitas atau tidak dapat ditinjau dari besar alokasi belanja yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Alokasi anggaran belanja yang efektif dan tepat sasaran pada sektor-sektor produktif yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini hanya ditinjau dari bidang ekonomi dan pelayanan umum. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi adalah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk sektor perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal,

ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum atau belanja daerah fungsi pelayanan umum adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah; pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah; perangkat daerah; perangkat daerah; kepegawaian dan persandian, kepegawaian, komunikasi dan informatika.

Untuk memperjelas gambaran perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Kabupaten/kota	Tahun	PPBE (Rupiah)	Perkembangan (%)	Rata-Rata (%)
Kerinci	2014	73.987.318.087,01		108,19
Kerinci	2015	60.593.021.538	(18,10)	
Kerinci	2016	12.909.170.895	(78,70)	
Kerinci	2017	82.945.049.804	542,53	
Kerinci	2018	72.178.660.046	(12,98)	
Merangin	2014	102.630.096.096,00	14118,90	(24,53)
Merangin	2015	70.617.111.824	(99,31)	
Merangin	2016	95.110.582.941	34,68	
Merangin	2017	62.756.441.655	(34,02)	
Merangin	2018	63.093.654,217	(1,04)	
Sarolangun	2014	95.339.567.178,00	15010,80	55,88
Sarolangun	2015	21.658.203.345	(99,77)	
Sarolangun	2016	73.137.780.080	237,69	
Sarolangun	2017	133.040.488.796	81,90	
Sarolangun	2018	137.966.261.355	3,70	
Batanghari	2014	79.862.373.372,89	5688,54	(10,26)
Batanghari	2015	55.507.526.230	(99,30)	
Batanghari	2016	104.297.312.608	(87,90)	
Batanghari	2017	65.732.534.110	(36,98)	
Batanghari	2018	70.550.790.109	(7,33)	
Muaro jambi	2014	74.673.242.375,01	10484,32	105,36
Muaro jambi	2015	39.429.220.037	(99,47)	
Muaro jambi	2016	7.539.461.958	(80,88)	
Muaro jambi	2017	53.264.059.758	606,47	
Muaro jambi	2018	50.777.515.481	(4,67)	
Tanjatim	2014	161.692.814.339,55	(31743,39)	(17,82)

Tanjabtlim	2015	97.385.908.515	(99,40)	
Tanjabtlim	2016	91.511.785.265	(6,03)	
Tanjabtlim	2017	120.600.102.235	(31,79)	
Tanjabtlim	2018	123.466.593.504	(2,38)	
Tanjabbar	2014	162.506.998.285,00	(13062,02)	(31,86)
Tanjabbar	2015	106.459.902.980	(99,34)	
Tanjabbar	2016	75.001.741.016	(29,55)	
Tanjabbar	2017	67.742.004.083	(9,68)	
Tanjabbar	2018	75.287.422.662	(11,14)	
Tebo	2014	81.362.923.700,00	(10706,97)	(28,13)
Tebo	2015	45.608.768.820	(99,44)	
Tebo	2016	177.695.700.141	(289,61)	
Tebo	2017	37.806.842.247	(78,72)	
Tebo	2018	38.217.736.829	1,09	
Bungo	2014	128.533.753.480,00	33531,96	(30,32)
Bungo	2015	88.011.197.886	(99,32)	
Bungo	2016	75.723.435.332	(13,96)	
Bungo	2017	64.537.586.279	(14,77)	
Bungo	2018	68.902.180.159	(6,76)	
Kota Jambi	2014	103.564.918.552,00	(14930,72)	(17,87)
Kota Jambi	2015	68.086.272.059	(99,34)	
Kota Jambi	2016	84.304.135.550	(23,82)	
Kota Jambi	2017	89.313.937.200	(5,94)	
Kota Jambi	2018	87.614.416.986	(1,90)	
Kota Sungai Penuh	2014	66.787.814.139,75	(7522,93)	(25,38)
Kota Sungai Penuh	2015	55.697.651.582	(99,17)	
Kota Sungai Penuh	2016	61.983.821.191	(11,29)	
Kota Sungai Penuh	2017	48.256.900.743	(22,15)	
Kota Sungai Penuh	2018	52.363.072.902	(8,51)	

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Kerinci sebesar 108,19 persen, kedua disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi sebesar 105,36 persen, Kabupaten Sarolangun sebesar 55,88 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 31,86 persen, Kabupaten Bungo sebesar 30,32 persen, Kabupaten Tebo sebesar 28,13 persen, Kota Sungai Penuh sebesar 25,38 persen Kabupaten Merangin sebesar 24,53, kemudian Kota Jambi sebesar 17,87 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 17,82 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Batanghari sebesar 10,26 persen.

Tabel 3.5
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Tahun 2014-2018
(Rupiah)

kabupaten/kota	Tahun	PPBPU (Rupiah)	Perkembangan	Rata-rata
Kerinci	2014	190.617.093.903,00		142,50
Kerinci	2015	133.591.706.706	-99,30	
Kerinci	2016	54.064.360.637	-59,53	
Kerinci	2017	451.555.165.247	735,22	
Kerinci	2018	422.750.503.436	-6,38	
Merangin	2014	228.623.566.376,61		8,52
Merangin	2015	179.717.462.727	-99,21	
Merangin	2016	375.029.161.628	108,68	
Merangin	2017	476.731.874.056	27,12	
Merangin	2018	464.748.476.459	-2,51	
Srolangun	2014	213.336.616.727,00		45,12
Sarolangun	2015	68.278.906.022	-99,68	
Sarolangun	2016	253.856.069.266	271,79	
Sarolangun	2017	285.030.013.783	12,28	
Sarolangun	2018	273.830.502.455	-3,93	
Batanghari	2014	216.858.325.261,14		86,73
Batanghari	2015	151.943.762.497	-99,30	
Batanghari	2016	902.377.230.026	493,89	
Batanghari	2017	418.591.215.359	-53,61	
Batanghari	2018	443.537.933.782	5,96	
Muaro jambi	2014	218.906.379.649,92		220,49
Muaro jambi	2015	126.197.345.478	-99,42	
Muaro jambi	2016	33.646.968.103	-73,34	
Muaro jambi	2017	388.759.104.607	1055,41	
Muaro jambi	2018	386.127.513.404	-0,68	
Tanjabtlim	2014	222.128.057.112,93		-7,20
Tanjabtlim	2015	161.752.467.529	-99,27	
Tanjabtlim	2016	197.982.385.983	22,40	
Tanjabtlim	2017	282.295.843.269	42,59	
Tanjabtlim	2018	297.840.701.712	5,51	
Tanjabbar	2014	288.235.068.969,00		-4,63
Tanjabbar	2015	201.219.671.020	-99,30	
Tanjabbar	2016	295.195.959.568	46,70	
Tanjabbar	2017	389.415.620.749	31,92	
Tanjabbar	2018	397.760.279.367	2,14	
Tebo	2014	131.631.526.735,00		6,83
Tebo	2015	136.373.360.967	-98,96	
Tebo	2016	301.074.591.056	120,77	
Tebo	2017	304.729.109.884	1,21	
Tebo	2018	317.797.021.598	4,29	

Bungo	2014	242.884.855.948,00		
Bungo	2015	193.927.739.667	-99,20	
Bungo	2016	301.970.970.895	55,71	-2,11
Bungo	2017	389.191.253.287	28,88	
Bungo	2018	413.245.013.883	6,18	
Kota Jambi	2014	225.217.121.232,00		
Kota Jambi	2015	183.403.149.047	-99,19	
Kota Jambi	2016	246.805.475.896	34,57	-8,99
Kota Jambi	2017	296.407.052.134	20,10	
Kota Jambi	2018	321.742.966.602	8,55	
Kota Sungai Penuh	2014	156.064.610.053,98		
Kota Sungai Penuh	2015	123.596.644.976	-99,21	
Kota Sungai Penuh	2016	209.943.312.005	69,86	-4,43
Kota Sungai Penuh	2017	214.735.512.188	2,28	
Kota Sungai Penuh	2018	234.805.073.639	9,35	

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum yang tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 220,49 persen, lalu disusul Kabupaten Kerinci sebesar 142,50 persen, Kabupaten Batanghari sebesar 86,73 persen, Kabupaten Sarolangun sebesar 45,12 persen, Kota Jambi sebesar 8,99 persen, Kabupaten Merangin sebesar 8,52 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 7,20 persen, Kabupaten Tebo sebesar 6,83 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 4,63 persen, Kota sungai Penuh sebesar 4,43 persen Kemudian terendah Kabupaten Bungo sebesar 2,11 persen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Estimasi Model Data Panel

Menganalisis data panel dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode *Common Effect Model* (CEM), metode *Fixed Effect Model* (FEM), metode *Random Effect Model* (REM). Dari hasil pengolahan *Eviews 8* mendapatkan hasil sebagai berikut:

4.1.1.1. Hasil *Common Effect Model*

Tabel 4.1 Hasil *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PPBE?	-0.071635	0.044829	-1.597982	0.1160
LN_PPBU?	0.129623	0.042700	3.035667	0.0037
R-squared	0.268917	Mean dependent var		1.663755
Adjusted R-squared	0.255123	S.D. dependent var		0.296159
S.E. of regression	0.255604	Akaike info criterion		0.145311
Sum squared resid	3.462670	Schwarz criterion		0.218305
Log likelihood	-1.996057	Hannan-Quinn criter.		0.173539
Durbin-Watson stat	0.798827			

Sumber: *Eviews 8*.

Dengan menggunakan *Common Effect Model* terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,225123. Artinya model ini hanya dapat menjelaskan variasi sebesar 25,51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.1.2. Hasil *Fixed Effect Model*

Tabel 4.2 Hasil *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LN_PPBE?	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846
LN_PPBP?	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.276038			
_MERANGIN—C	0.089448			
_SAROLANGUN--C	-0.201637			
_BATANGHARI—C	-0.043566			
_MUARJAMBI--C	0.116644			
_TANJABTIM—C	-0.557403			
_TANJABBAR—C	-0.153141			
_TEBO—C	0.112543			
_BUNGO—C	0.014840			
_KOTAJAMBI—C	0.117789			
_SUNGAIPENUH--C	0.228446			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.786149	Mean dependent var	2.255480	
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var	0.949327	
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid	1.055024	
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat	2.118729	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.764842	Mean dependent var	1.663755	
Sum squared resid	1.113795	Durbin-Watson stat	2.057426	

Sumber: *Eviews 8*.

Dengan menggunakan *Fixed Effect Model* terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,725048. Artinya model ini hanya dapat menjelaskan variasi sebesar 72,51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.1.3. Hasil *Random Effect Model*

Tabel 4.3 Hasil *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.535134	0.327718	-1.632907	0.1085
LN_PPBE?	0.000329	0.032248	0.010197	0.9919
LN_PPBP?	0.080757	0.034459	2.343561	0.0230
Random Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.197180			
_MERANGIN—C	0.069383			
_SAROLANGUN--C	-0.154349			
_BATANGHARI—C	-0.049172			
_MUARJAMBI--C	0.090663			
_TANJABTIM—C	-0.445035			
_TANJABBAR—C	-0.126295			
_TEBO—C	0.097154			
_BUNGO—C	0.012463			
_KOTAJAMBI—C	0.108526			
_SUNGAIPENUH--C	0.199482			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.167511	0.5197
Idiosyncratic random			0.161020	0.4803
Weighted Statistics				
R-squared	0.452255	Mean dependent var		0.657081
Adjusted R-squared	0.431188	S.D. dependent var		0.224060
S.E. of regression	0.168986	Sum squared resid		1.484917
F-statistic	21.46732	Durbin-Watson stat		1.529445
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.244561	Mean dependent var		1.663755
Sum squared resid	3.578028	Durbin-Watson stat		0.634735

Sumber: *Eviews 8*.

Dengan menggunakan *Random Effect Model* terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,431188. Artinya model ini hanya dapat menjelaskan variasi sebesar 43,12 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.2. Hasil Pengujian Model Data Panel

Untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan untuk regresi data panel dari ketiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, maka pengujian model data panel menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* sebagai berikut:

4.1.2.1. Hasil Uji *Chow*

Uji *Chow* untuk menentukan model estimasi yang lebih baik digunakan untuk regresi data panel antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dengan hipotesis:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dari hasil pengolahan *Eviews 8* Uji *Chow* mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.362623	(10,42)	0.0000

Sumber: *Eviews 8*.

Berdasarkan estimasi model *Fixed Effect* tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha = 0.05$ persen sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, maka model estimasi regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.1.2.2. Hasil Uji *Hausman*

Setelah diketahui bahwa metode regresi *Fixed Effect Model* lebih baik dari metode *Common Effect Model*, Uji selanjutnya adalah Uji *Hausman* yaitu uji menentukan model estimasi yang lebih baik digunakan untuk regresi data panel antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* dengan hipotesis:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dari hasil pengolahan *Eviews 8* Uji *Hausman* mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.272081	2	0.0264

Sumber: *Eviews 8*

Berdasarkan estimasi model *Fixed Effect* tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar $0,0264 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, maka estimasi model regresi data panel yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.1.3. Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Dari pengujian data panel dengan menggunakan Uji *Hausman* dan Uji *Chow* maka model terbaik yang digunakan untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Dari hasil pengolahan *Eviews 8* menggunakan *Fixed Effect Model* mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LN_PPBE?	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846***
LN_PPBP?	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461***
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.276038			
_MERANGIN—C	0.089448			
_SAROLANGUN—C	-0.201637			
_BATANGHARI—C	-0.043566			
_MUAROJAMBI—C	0.116644			
_TANJABTIM—C	-0.557403			
_TANJABBAR—C	-0.153141			
_TEBO—C	0.112543			
_BUNGO—C	0.014840			
_KOTAJAMBI—C	0.117789			
_SUNGAIPENUH—C	0.228446			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.786149	Mean dependent var	2.255480	
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var	0.949327	
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid	1.055024	
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat	2.118729	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.764842	Mean dependent var	1.663755	
Sum squared resid	1.113795	Durbin-Watson stat	2.057426	

Sumber: *Eviews 8*.

Keterangan:

- * : $\alpha = 1\%$ (0.01)
- ** : $\alpha = 5\%$ (0.05)
- *** : $\alpha = 10\%$ (0.1)

Dari hasil estimasi regresi menggunakan model *Fixed Effect* diatas dapat disimpulkan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln_PE}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln_PPBE}_{it} + \beta_2 \text{Ln_PPBPU}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Ln_PE}_{it} = -0,307939 + 0,046829 \text{Ln_PPBE}_{it} + 0,028119 \text{Ln_PPBPU}_{it}$$

sesuai dengan hasil estimasi regresi menggunakan model *Fixed Effect*, maka model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta atau intersep adalah sebesar $-0,307939$. Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menurun sebesar $0,307939$ persen.
2. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar $0,046829$. Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi Provinsi Jambi meningkat sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat sebesar $0,046829$ persen dengan asumsi pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tetap (*ceteris paribus*).
3. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sebesar $0,028119$. Angka ini menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum Provinsi Jambi meningkat sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat sebesar $0,028119$ persen dengan asumsi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi tetap (*ceteris paribus*).

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel memperoleh model terbaik yaitu *Fixed Effect Model*, maka didapat konstanta atau intersep persamaan model regresi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Persamaan model regresi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur} = -0,307939 + -0,557403 + 0,046829 \text{Ln_PPBE} + 0,028119 \text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,865342 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan sebesar 0,865342 persen.

2. Persamaan model regresi Kabupaten Sarolangun

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun} = -0,307939 + -0,201637 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,509576 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan sebesar 0,509576 persen.

3. Persamaan model regresi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat} = -0,307939 + -0,153141 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,46108 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 0,46108 persen.

4. Persamaan model regresi Kabupaten Batanghari

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batanghari} = -0,307939 + -0,043566 + 0,046829\text{PPBE} + 0,028119\text{PPBPU}.$$

Konstata -0,351505 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 0,351505 persen.

5. Persamaan model regresi Kabupaten Merangin

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin = $-0,307939 + 0,089448 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}$.

Konstata $-0,218491$ menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar $0,218491$ persen.

6. Persamaan model regresi Kabupaten Tebo

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo = $-0,307939 + 0,112543 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}$.

Konstata $-0,195396$ menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar $0,195396$ persen.

7. Persamaan model regresi Kabupaten Muaro Jambi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi = $-0,307939 + 0,116644 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}$.

Konstata $-0,191295$ menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar $0,191295$ persen.

8. Persamaan model regresi Kota Jambi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi = $-0,307939 + 0,1177889 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}$.

Konstata $-0,19015$ menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar $0,19015$ persen.

9. Persamaan model regresi Kabupaten Bungo

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo} = -0,307939 + 0,014840 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,159539 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 0,159539 persen.

10. Persamaan model regresi Kota Sungai Penuh

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh} = -0,307939 + 0,228446 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,079493 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 0,079493 persen.

11. Persamaan model regresi Kabupaten Kerinci

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci} = -0,307939 + 0,276038 + 0,046829\text{Ln_PPBE} + 0,028119\text{Ln_PPBPU}.$$

Konstata -0,031901 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya sama dengan nol, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 0,031901 persen.

4.1.3 Hasil Koefisien Determinasi ($Adjusted R^2$) dan Koefisien Korelasi (R)

Koefisien determinasi (*Adjusted R- Sqared*) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai (*Adjusted R- Sqare*) semakin mendekati satu maka semakin baik, yang artinya variabel independen yang digunakan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,725048 hal ini berarti bahwa kemampuan variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 72,51 persen. Sisanya sebesar 27,49 dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* diketahui nilai R-Squared sebesar 0,786149, untuk memperoleh nilai R maka $\sqrt{0,786149} = 0,886650$. Nilai R sebesar 88,67 berarti bahwa tingkat korelasi antara variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap variabel pertumbuhan ekonomi adalah sangat kuat. Hal ini ditandai dengan nilai R yang semakin mendekati angka 1.

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian model data panel, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh antara variabel independen (pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) baik secara simultan maupun secara parsial sebagai berikut:

4.1.4.1 Secara Simultan (Uji F-Statistik)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dilakukan dengan uji F-Statistik.

Berdasarkan hasil regresi estimasi model *Fixed Effect* dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen $\alpha = (0,05 \text{ persen})$ dan *degree of freedom* (df)=53.

Maka diperoleh Nilai F_{tabel} sebesar 3,17, dari hasil regresi diperoleh nilai (*F-statistic*) sebesar 12.86652. Apabila dibandingkan dengan F_{tabel} maka nilai (*F-statistic*) > F_{tabel} ($12.86652 > 3,17$) atau signifikansi nilai probabilitas (*F-statistic*) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,00000 < 0,05$) dengan tingkat keyakinan 95 persen, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

4.1.4.2 Secara Parsial (Uji t-Statistik)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen independen (pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

Berdasarkan hasil regresi estimasi model *Fixed Effect* menggunakan tingkat keyakinan 90 persen $\alpha = 0.1$ (0.1 persen) dan *degree of freedom* (df)=53.

Maka diperoleh nilai *t-statistic* variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar 1.766245. Angka ini apabila dibandingkan dengan t_{tabel} maka nilai *t-statistic* $> t_{tabel}$ ($1.766245 > 1.29837$) atau nilai signifikansi probabilitas statistic lebih kecil dari $\alpha = 0.1$ ($0.0846 < 0.1$) dengan tingkat keyakinan 90 persen, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dan diperoleh nilai *t-statistic* variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sebesar 0.952926. Angka ini apabila dibandingkan dengan t_{tabel} maka nilai *t-statistic* $< t_{tabel}$ ($0.952926 < 1.29837$) atau nilai signifikansi probabilitas statistic lebih besar dari $\alpha = 0.1$ ($0.3461 > 0.1$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan penelitian ini dari hasil estimasi model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum mengalami perubahan naik atau turun maka akan ikut mempengaruhi perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori Keynesian Cross dalam (Mankiw, 2003:257) yang menyatakan bahwa kenaikan belanja pemerintah sebesar (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan Y_1 ke Y_2 kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan belanja pemerintah (ΔG). Jadi kebijakan fiskal berupa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merri Anitasari dan Ahmad Soleh (2015) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan penelitian ini dari hasil estimasi model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi mengalami perubahan naik atau turun maka akan ikut mempengaruhi perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori Sukirno (2015:97) yang menyatakan Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiansyah, Muh (2014) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan penelitian ini dari hasil estimasi model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori Kuncoro (2004:90) yang menyatakan bahwa belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Zahari, M. (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Tidak signifikannya pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi pada penelitian ini Hal ini memperkuat anggapan bahwa pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayanan publik belum terlaksana secara optimal, merata dan tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan dan fasilitas publik tidak dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, seperti pembangunan sarana prasarana fasilitas umum cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan di desa-desa sehingga sebagian kalangan masyarakat yang tinggal di desa kesulitan untuk dapat menikmati manfaat sarana dan prasarana fasilitas publik, seperti masih sulitnya sebagian masyarakat untuk mendapatkan layanan umum seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan, kemudian infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan dan jembatan masih banyak yang rusak sehingga mengganggu arus pendistribusian barang dan jasa yang menghambat kegiatan perekonomian yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas maka dapat diambil beberapa Implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Maka, implikasi kebijakannya adalah pemerintah daerah harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian anggaran belanja daerah atau pengeluaran pemerintah dibidang ekonomi, memperhatikan dan mendukung pembiayaan terkait kebutuhan anggaran belanja daerah untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pada semua sektor-sektor bidang ekonomi terkait penyediaan barang dan jasa dan membangun sarana dan prasarana seperti jalan, rumah sakit, sekolah dan pembangunan ekonomi lainnya yang berkualitas dan memadai diseluruh desa maupun perkotaan di Provinsi Jambi agar dapat menjadi investasi bagi daerah untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modal di daerah dan melakukan kegiatan ekonomi di daerah yang dapat membantu melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat daerah sehingga dapat pula meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat daerah dan menambah pendapatan daerah di Provinsi Jambi yang di harapkan akan dapat pula meningkatkan pembiayaan pengalokasian anggaran belanja daerah atau pengeluaran pemerintah di seluruh sektor-sektor bidang ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

2. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Maka, implikasi kebijakannya adalah pemerintah harus berfokus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat daerah sehingga dapat pembangunan dan pelayanan publik meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat daerah sesuai kebutuhan daerah sehingga manfaat layanan umum dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
2. Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
3. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. oleh karena itu, pemerintah daerah harus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengalokasian anggaran belanja daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan pembangunan pada semua sektor ekonomi yang berkualitas agar dapat merangsang produktivitas kegiatan perekonomian masyarakat daerah yang sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Mengingat besarnya porsi pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum dibandingkan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. pemerintah perlu mengevaluasi hasil pembangunan dan fasilitas layanan umum atau publik yang telah dilaksanakan, agar pemerintah bisa mengetahui apa penyebab

besarnya anggaran yang dialokasikan di bidang pelayanan umum namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran yang dialokasikan dengan porsi yang sangat besar tidak sia-sia dan dapat dialokasikan untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor yang lebih memacu pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki dan Prawoto, Nano. 2017. **Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS**. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Anitasari, M dan Soleh. 2015. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu**.Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. *Dipublikasikan*.
- Arsyad, Lincolin. 2010. **Ekonomi Pembangunan**. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. **Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi, Kabupaten/Kota 2010-2018**.
- Badrudin, Rudy. 2012. **Ekonomika Otonomi Daerah**. Yogyakarta: UPP STTM YKPN.
- Batalgi, B.H. 2005. **Econometric Analysis of Panel Data**. John Wiley & Sons Canada.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. **Data keuangan daerah mulai 2006**.
- Dumairy. 1996. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati. Damodar. N. 2015. **Dasar-dasar Ekonometrika**. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasiram, Moh. 2008. **Metodologi Penelitian**. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kisra, Jeval. 2014. **Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabpupaten Nagan Raya**. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Teuku Umar Meualabo. *Dipublikasikan*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang**. Jakarta: Erlangga.
- Mangokoesoebroto, Guritno. 1994. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw. N. Gregory. 2003. **Teori makroekonomi**. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw. N. Gregory. 2006. **Pengantar Ekonomi Makro**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw. N. Gregory. 2007. **Makroekonomi**. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw. N. Gregory. 2013. **Pengantar Ekonomi Makro**. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanga, Muana. 2001. **Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Rusdiansyah, Muh. 2014. **Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2000-2012**". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Dipublikasikan*.

Samuelson, Paul A. Dan William, D Nordhaus. 2001. **Ilmu Makro Ekonomi**. Jakarta : PT. Media Edukasi.

Saragih, Juli Panglima. 2003. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi**. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Subandi, MM. 2011. **Ekonomi Pembangunan**. Bandung: Alfabeta.

Subandi, MM. 2014. **Ekonomi Pembangunan**. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2000. **Makroekonomi**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2006. **Makroekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2008. **Makroekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono 2010. **Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan**. Jakarta: Kencana.

Sukirno, Sadono. 2013. **Makroekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2015. **Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)**. Jakarta: Prenada Media Group.

Sukirno, Sadono. 2017. **Makroekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: Rajawali Pers.

Zahari, M. (2017). **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi**. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180-196. *Dipublikasikan*.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Mentah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen)

Wilayah	Laju pertumbuhan PDRB ADHK ,prov, kab/kota (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
PROVINSI JAMBI	7.76	4.21	4.37	4.64	4.71
KERINCI	9.06	6.45	6.70	6.03	5.10
MERANGIN	7.13	5.48	6.21	5.55	5.17
SAROLANGUN	5.20	3.09	4.26	4.69	4.72
BATANGHARI	7.56	4.36	4.55	4.82	4.96
MUARO JAMBI	8.03	5.24	5.43	5.06	5.27
TANJUNG JABUNG TIMUR	5.81	1.87	2.70	3.13	3.13
TANJUNG JABUNG BARAT	5.85	3.98	3.14	4.25	6.89
TEBO	8.83	5.28	5.38	5.60	5.02
BUNGO	6.74	5.13	5.20	5.67	4.72
KOTA JAMBI	8.17	5.56	6.81	4.68	5.48
KOTA SUNGAI PENUH	7.54	7.06	6.51	6.24	5.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Lampiran 2

Data Mentah Realisasi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum tahun 2014-2018 (Rupiah).

REALISASI BELANJA PER FUNGSI PADA APBD 2014

Per 10 April 2017

No.	Daerah	Pelayanan Umum	Ekonomi
1	Prov. Aceh	990.969.300.479	1.247.158.765.605
2	Kab. Aceh Barat	128.834.044.488	113.088.261.260
3	Kab. Aceh Besar	266.103.864.914	154.658.253.371
4	Kab. Aceh Selatan	170.629.658.055	117.160.065.309
5	Kab. Aceh Singkil	148.170.681.861	93.730.734.179
6	Kab. Aceh Tengah	260.515.176.385	70.932.899.764
7	Kab. Aceh Tenggara	226.853.781.103	84.823.583.134
8	Kab. Bireun	264.256.627.771	92.375.136.010
9	Kota Banda Aceh	194.676.077.602	63.989.621.390
10	Kota Sabang	297.004.933.074	135.335.989.966
11	Kota Langsa	115.158.046.007	32.239.837.696
12	Kota Lhokseumawe	306.752.344.331	21.494.550.607
13	Kab. Gayo Lues	179.001.812.167	77.018.410.129
14	Kab. Aceh Barat Daya	153.336.674.820	77.768.744.223
15	Kab. Aceh Jaya	140.060.062.839	120.374.927.420
16	Kab. Aceh Tamiang	167.207.004.901	96.617.848.661
17	Kab. Pidie Jaya	138.974.596.395	74.543.567.541
18	Kab. Asahan	255.872.492.195	120.775.306.783
19	Kab. Deli Serdang	309.890.887.865	165.124.042.663
20	Kab. Karo	108.058.451.345	54.604.086.303
21	Kab. Labuhanbatu	174.264.238.000	65.617.708.681
22	Kab. Langkat	245.822.144.790	77.697.425.905
23	Kab. Mandailing Natal	172.410.084.296	78.310.366.906
24	Kab. Nias	104.560.506.252	47.742.249.742
25	Kab. Simalungun	307.058.508.135	131.960.175.705
26	Kab. Tapanuli Tengah	160.802.410.313	65.243.252.293
27	Kab. Tapanuli Utara	153.528.252.622	60.707.731.594
28	Kab. Toba Samosir	134.930.950.382	102.136.632.529
29	Kota Medan	858.534.585.124	201.431.260.786
30	Kota Pematangsiantar	175.445.157.151	55.106.983.432
31	Kota Tebing Tinggi	86.964.581.915	43.312.880.984
32	Kota Padangsidimpuan	131.092.696.342	38.743.674.774
33	Kab. Humbang Hasundutan	117.304.410.872	54.316.607.649
34	Kab. Serdang Bedagai	209.268.071.566	72.045.465.748
35	Kab. Samosir	105.122.135.879	54.716.350.179
36	Kab. Padang Lawas	120.533.192.180	48.348.810.844

37	Kab. Padang Lawas Utara	118.591.031.878	65.131.432.551
38	Kab. Labuhanbatu Selatan	114.526.229.762	43.294.729.721
39	Prov. Sumatera Barat	1.637.799.242.656	380.533.540.942
40	Kab. Kepulauan Mentawai	426.180.820.619	14.959.679.468
41	Kab. Pasaman	143.913.277.512	49.576.163.093
42	Kab. Pesisir Selatan	201.601.489.412	84.626.795.683
43	Kab. Sijunjung	151.285.155.747	67.256.725.050
44	Kab. Solok	176.765.387.505	63.401.175.403
45	Kab. Tanah Datar	189.285.060.495	67.874.526.328
46	Kota Bukittinggi	141.878.606.072	44.990.452.679
47	Kota Padang Panjang	208.475.954.880	71.728.858.076
48	Kota Payakumbuh	550.166.073.448	209.120.135.360
49	Kota Sawahlunto	830.729.440.662	174.041.373.408
50	Kab. Pasaman Barat	169.750.906.795	70.626.157.436
51	Kab. Solok Selatan	114.321.911.986	41.971.131.667
52	Prov. Riau	3.377.847.937.846	522.181.461.783
53	Kab. Indragiri Hilir	1.208.884.197.851	41.218.755.318
54	Kab. Indragiri Hulu	414.336.582.713	277.940.076.321
55	Kab. Kampar	928.801.214.750	422.004.467.954
56	Kab. Pelalawan	429.270.882.813	181.444.717.786
57	Kota Dumai	238.643.574.539	138.345.100.490
58	Prov. Jambi	1.951.225.428.823	333.851.498.810
59	Kab. Batanghari	234.386.075.267	74.003.472.326
60	Kab. Bungo	212.074.124.648	118.809.218.427
61	Kab. Tanjung Jabung Barat	270.204.791.578	129.943.081.585
62	Kab. Tanjung Jabung Timur	203.299.193.246	139.275.110.823
63	Kab. Tebo	301.832.782.806	107.897.278.536
64	Kota Jambi	688.831.804.767	295.043.730.351
65	Kota Sungai Penuh	125.467.955.519	58.334.808.097

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

REALISASI BELANJA PER FUNGSI PADA APBD 2015*(dlm rupiah)*

Daerah	Fungsi Pelayanan Umum	Fungsi Ekonomi
PEMERINTAH ACEH	487.051.589.718	409.696.910.422
Kab. Aceh Barat	103.911.183.325	61.121.345.537
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR	159.422.005.039	84.945.775.688
Kab. Aceh Selatan	206.423.489.623	58.370.655.850
KABUPATEN SINGKIL	98.916.141.282	76.045.724.113
Kab. Aceh Tengah	149.565.349.391	48.167.818.924
Kab. Aceh Tenggara	130.971.734.270	79.404.503.000
Kab. Aceh Timur	224.679.485.014	50.173.690.746
Kab. Aceh Utara	195.240.989.260	65.012.020.114
Kab. Bireuen	136.577.969.780	62.519.641.816
Kab. Pidie	153.214.007.407	47.167.637.379
Kab. Simeulue	113.398.829.499	62.558.908.534
KOTA BANDA ACEH	127.104.707.440	43.744.923.731
Kota Sabang	103.637.353.921	53.739.519.937
Kota Langsa	94.368.409.172	37.369.937.136
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE	127.337.406.973	48.628.104.840
Kab. Gayo Lues	138.852.012.738	64.111.030.882
Kab. Aceh Barat Daya	112.885.206.951	70.192.535.466
Kab. Aceh Jaya	156.978.138.121	92.140.098.766
Kab. Nagan Raya	153.655.645.741	66.783.222.251
Kab. Aceh Tamiang	168.547.338.080	77.894.187.434
Kab. Bener Meriah	124.265.801.920	60.287.638.460
Kab. Pidie Jaya	91.842.026.479	55.311.222.706
Kota Subulussalam	105.153.036.369	53.069.436.608
Provinsi Sumatera Utara	469.719.232.919	340.384.373.519
Kab. Asahan	137.145.609.688	70.068.360.495
Kab. Dairi	100.774.366.050	59.956.132.220
Kab. Deli Serdang	220.452.811.713	125.979.946.441
Kab. Karo	90.602.836.750	44.922.769.462
Kab. Labuhanbatu	119.604.767.063	58.095.482.063
Kab. Langkat		
Kab. Mandailing Natal	143.408.267.236	66.945.358.637
Kab. Nias	90.312.378.048	51.895.297.842
Kab. Simalungun	211.778.202.471	89.121.262.833
Kab. Tapanuli Selatan	125.879.799.555	83.086.069.238
Kab. Tapanuli Tengah	126.701.465.200	54.824.032.200
Kab. Tapanuli Utara	136.990.700.137	61.890.141.701

Kab. Toba Samosir	101.684.000.063	60.799.532.287
Kota Binjai	110.439.091.511	32.781.215.487
Kota Medan	440.818.350.671	150.830.726.000
Kota PematangSiantar	131.806.285.948	34.866.771.253
Kota Sibolga	83.720.305.460	51.176.849.009
Kota TanjungBalai	94.114.036.065	30.311.633.873
Kota Tebing Tinggi	87.225.925.700	30.156.229.100
Kota Padang Sidempuan	134.016.520.899	30.596.914.769
Kab. Pakpak Bharat	92.452.773.011	46.346.886.648
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN	125.919.545.325	32.155.458.700
Kab. Humbang Hasundutan	98.121.250.265	53.706.422.554
Kab. Serdang Bedagai	146.089.543.518	45.486.360.825
Kab. Samosir	98.132.659.258	50.131.694.547
Kab. BatuBara	121.104.815.136	58.169.880.225
Kab. Padang Lawas	115.702.053.250	50.954.682.671
Kab. Padang Lawas Utara	105.771.667.050	36.658.862.972
Kab. Labuhanbatu Selatan	106.543.913.295	38.394.556.335
Kab. Labuhanbatu Utara	104.149.831.345	54.980.172.674
Kab. Nias Utara	100.620.273.423	41.143.732.154
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT	73.863.720.472	30.960.603.186
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI	93.946.966.666	52.164.712.296
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	228.232.780.568	250.617.650.938
Kab. Limapuluh Kota	194.178.290.560	136.925.607.972
Kab. Agam	328.404.536.829	162.031.302.367
Kab. Kepulauan Mentawai	216.994.993.320	89.189.116.987
Kab. Padang Pariaman	92.458.118.951	50.270.915.420
Kab. Pasaman	124.738.820.892	46.073.160.875
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	121.391.370.106	66.105.887.116
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG	128.197.031.602	51.418.009.595
PEMERINTAH KAB.SOLOK	111.330.576.197	46.799.751.200
Kab. Tanah Datar	183.178.944.866	50.712.656.776
Kota Bukit Tinggi	118.984.809.967	42.835.405.775
Kota Padang Panjang	97.313.949.904	38.961.368.440
Kota Padang	190.384.920.754	126.116.255.382
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	102.907.247.240	51.056.260.583
Kota Sawahlunto	101.079.027.590	35.848.229.013
Kota Solok	103.097.555.678	39.065.140.256
Kota Pariaman	93.814.279.850	50.876.182.760
Kab. Pasaman Barat	150.422.490.965	78.720.588.138
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	76.723.067.194	52.223.368.015
Kab. Solok Selatan	81.626.096.094	41.244.921.698
PROVINSI RIAU	572.477.450.469	423.672.618.132
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS	354.916.327.546	219.999.080.562

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	265.665.851.783	157.794.940.198
Kab. Indragiri Hulu	210.887.734.035	169.351.656.903
Kab. Kampar	220.256.040.837	168.745.436.905
Kab. Kuantan Singingi	229.650.849.575	70.243.324.191
Kab. Pelalawan	205.389.931.634	146.381.135.906
ROKAN HILIR	388.014.919.612	261.584.656.089
Kab. Rokan Hulu	198.575.848.508	67.157.084.093
Kab. Siak	370.503.542.551	141.089.261.596
Kota Dumai	204.920.734.941	71.031.673.294
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU	339.049.058.742	127.995.051.837
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	278.488.693.777	147.563.956.095
Provinsi Jambi	224.119.292.170	207.479.129.772
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI	151.943.762.497	55.507.526.230
KAB. BUNGO	193.927.739.667	88.011.197.886
Kab. Kerinci	133.591.706.706	60.593.021.538
Kab. Merangin	179.717.462.727	70.617.111.824
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI	126.197.345.478	39.429.220.037
Kab. Sarolangun	68.278.906.022	21.658.203.345
Kab. Tanjung Jabung Barat	201.219.671.020	106.459.902.980
PEMERINTAH TANJUNG JABUNG TIMUR	161.752.467.529	97.385.908.515
KAB. TEBO	136.373.360.967	45.608.768.820
PEMERINTAH KOTA JAMBI	183.403.149.047	68.086.272.059
kota sungai penuh	123.596.644.976	55.697.651.582

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

REALISASI BELANJA APBD 2016 PER FUNGSI*Per 18 September 2016**503 daerah**(dalam rupiah)*

No.	Daerah	Fungsi Ekonomi	Fungsi Pelayanan Umum
1	Prov. Aceh	1.421.672.508.754	5.836.450.933.362
2	Kab. Aceh Barat	102.956.350.932	414.314.093.451
3	Kab. Aceh Besar	133.126.374.673	716.445.967.122
4	Kab. Aceh Selatan	125.598.221.714	423.978.355.763
5	Kab. Aceh Singkil	25.959.258.898	78.420.362.519
6	Kab. Aceh Tengah	84.425.646.856	472.373.395.690
7	Kab. Aceh Tenggara	5.958.792.782	11.726.835.712
8	Kab. Aceh Timur	97.444.024.916	665.255.750.392
9	Kab. Aceh Utara	144.956.000.852	999.978.440.305
10	Kab. Bireuen	101.689.771.187	695.095.438.132
11	Kab. Pidie	13.688.519.222	31.971.128.747
12	Kab. Simeulue	180.299.918.756	594.847.260.822
13	Kota Banda Aceh	76.203.402.952	331.818.843.715
14	Kota Sabang	18.164.230.346	31.997.203.961
15	Kota Langsa	12.570.900.198	41.327.638.841
16	Kota Lhokseumawe	43.512.265.003	275.914.133.267
17	Kab. Gayo Lues	127.375.518.082	334.158.363.778
18	Kab. Aceh Barat Daya	82.710.749.395	289.263.219.202
19	Kab. Aceh Jaya	131.050.131.476	298.034.759.840
20	Kab. Nagan Raya	8.948.765.501	50.268.278.265
21	Kab. Aceh Tamiang	81.254.055.726	405.760.908.685
22	Kab. Bener Meriah	11.651.385.167	41.271.440.854
23	Kab. Pidie Jaya	83.922.733.757	308.177.800.823
24	Kota Subulussalam	92.081.324.126	264.089.577.219
25	Prov. Sumatera Utara	60.058.636.646	662.631.578.280
26	Kab. Asahan	151.170.347.844	434.827.193.452
27	Kab. Dairi	66.261.679.203	252.510.651.548
28	Kab. Deli Serdang	130.985.865.182	731.546.300.159
29	Kab. Karo	62.716.853.684	368.355.628.026
30	Kab. Labuhanbatu	66.462.324.490	257.267.419.052
31	Kab. Langkat	103.074.636.525	489.686.090.243
32	Kab. Mandailing Natal	49.623.255.210	243.312.978.186
33	Kab. Nias	10.317.416.657	34.365.553.222
34	Kab. Simalungun	16.083.271.731	174.241.384.182
35	Kab. Tapanuli Selatan	25.138.453.529	27.152.681.158
36	Kab. Tapanuli Tengah	22.891.252.482	38.932.646.974
37	Kab. Tapanuli Utara	88.887.470.425	377.003.043.467

38	Kab. Toba Samosir	73.954.345.860	337.577.700.927
39	Kota Binjai	6.565.554.671	42.279.565.117
40	Kota Pematang Siantar	60.182.742.056	211.608.808.374
41	Kota Sibolga	78.408.585.945	130.415.053.358
42	Kota Tanjung Balai	42.031.128.319	163.947.765.830
43	Kota Tebing Tinggi	9.731.744.375	17.160.225.341
44	Kota Padang Sidempuan	11.962.347.083	42.699.631.287
45	Kab. Pakpak Bharat	61.361.635.008	173.065.973.912
46	Kab. Nias Selatan	18.255.280.186	367.373.302.613
47	Kab. Humbang Hasundutan	59.847.819.469	293.629.307.554
48	Kab. Serdang Bedagai	23.940.283.795	66.993.516.838
49	Kab. Samosir	19.379.856.132	53.636.142.311
50	Kab. Batu Bara	64.233.187.016	293.614.437.851
51	Kab. Padang Lawas	55.961.807.625	384.270.719.478
52	Kab. Padang Lawas Utara	55.316.832.514	401.936.676.137
53	Kab. Labuhanbatu Selatan	54.351.478.123	193.560.285.038
54	Kab. Labuhanbatu Utara	8.000.546.934	17.220.812.847
55	Kab. Nias Barat	43.617.225.099	116.416.172.744
56	Kota Gunungsitoli	8.812.050.115	54.952.244.957
57	Prov. Sumatera Barat	426.322.184.916	2.414.517.842.291
58	Kab. Limapuluh Kota	22.426.715.566	44.355.586.725
59	Kab. Agam	61.325.719.058	303.328.625.857
60	Kab. Padang Pariaman	72.169.307.077	271.562.583.307
61	Kab. Pasaman	70.599.872.760	209.717.768.139
62	Kab. Pesisir Selatan	93.653.413.412	357.178.261.802
63	Kab. Sijunjung	76.816.811.430	228.055.181.495
64	Kab. Solok	69.611.977.291	320.745.389.740
65	Kab. Tanah Datar	11.708.516.147	61.317.860.974
66	Kota Bukit Tinggi	56.191.467.669	158.878.211.353
67	Kota Padang Panjang	73.562.456.647	99.539.328.625
68	Kota Padang	235.746.817.795	355.902.170.703
69	Kota Payakumbuh	72.697.662.825	156.604.875.572
70	Kota Sawahlunto	42.702.552.980	168.508.660.086
71	Kota Solok	6.719.893.757	30.127.658.248
72	Kota Pariaman	53.163.927.611	172.509.523.685
73	Kab. Pasaman Barat	100.012.841.116	222.614.790.983
74	Kab. Dharmasraya	64.295.402.130	164.535.487.629
75	Kab. Solok Selatan	30.930.461.378	73.872.812.772
76	Prov. Riau	645.064.269.659	4.524.951.012.286
77	Kab. Bengkalis	14.273.145.853	25.965.970.204
78	Kab. Indragiri Hilir	202.450.040.756	553.759.780.915
79	Kab. Indragiri Hulu	130.883.425.283	449.493.275.965
80	Kab. Kampar	169.877.485.632	215.226.837.917

81	Kab. Kuantan Singingi	4.006.583.757	30.025.821.143
82	Kab. Pelalawan	157.959.897.871	443.775.187.666
83	Kab. Rokan Hulu	-	352.825.234
84	Kab. Siak	74.526.804.948	66.910.108.998
85	Kota Dumai	15.908.186.738	40.129.769.940
86	Kota Pekanbaru	122.678.166.061	376.563.804.579
87	Prov. Jambi	362.025.912.627	1.416.496.577.169
88	Kab. Batanghari	104.297.312.608	902.377.230.026
89	Kab. Bungo	75.723.435.332	301.970.970.895
90	Kab. Kerinci	12.909.170.895	54.064.360.637
91	Kab. Merangin	95.110.582.941	375.029.161.628
92	Kab. Muaro Jambi	7.539.461.958	33.646.968.103
93	Kab. Sarolangun	73.137.780.080	253.856.069.266
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	75.001.741.016	295.195.959.568
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	91.511.785.265	197.982.385.983
96	Kab. Tebo	177.695.700.141	301.074.591.065
97	Kota Jambi	84.304.135.550	246.805.475.896
98	Kota Sungai Penuh	61.983.821.191	209.943.312.005

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan



BELANJA MENURUT FUNGSI PADA REALISASI APBD 2017*Per 5 September 2019**Jumlah: 542 daerah*

No.	Nama Pemda	Fungsi Ekonomi	Fungsi Pelayanan Umum
1	Provinsi Aceh	1.400.137.513.167	5.026.862.050.221
2	Kab. Aceh Barat	88.842.620.487	444.978.852.041
3	Kab. Aceh Besar	154.980.096.934	789.409.725.223
4	Kab. Aceh Selatan	105.939.709.278	488.353.274.141
5	Kab. Aceh Singkil	88.443.855.782	277.754.303.066
6	Kab. Aceh Tengah	88.330.866.954	477.328.651.885
7	Kab. Aceh Tenggara	82.499.412.442	444.053.080.975
8	Kab. Aceh Timur	86.385.497.291	786.490.501.750
9	Kab. Aceh Utara	127.304.741.412	948.102.702.012
10	Kab. Bireuen	112.481.373.191	254.106.249.572
11	Kab. Pidie	84.238.115.897	872.959.972.981
12	Kab. Simeulue	95.162.384.675	327.640.329.747
13	Kota Banda Aceh	70.727.624.361	326.668.513.812
14	Kota Sabang	58.482.550.225	194.132.204.666
15	Kota Langsa	40.333.499.670	260.013.363.255
16	Kota Lhokseumawe	39.125.367.266	280.338.230.992
17	Kab. Gayo Lues	79.337.535.415	390.726.949.849
18	Kab. Aceh Barat Daya	93.595.654.477	315.535.609.091
19	Kab. Aceh Jaya	114.273.046.816	330.977.555.591
20	Kab. Nagan Raya	65.816.891.723	362.874.653.328
21	Kab. Aceh Tamiang	57.316.575.881	461.305.676.302
22	Kab. Bener Meriah	69.570.491.732	418.560.989.807
23	Kab. Pidie Jaya	81.525.415.497	386.204.207.024
24	Kota Subulussalam	65.004.780.287	238.993.704.683
25	Provinsi Sumatera Utara	843.836.714.270	3.896.819.165.402
26	Kab. Asahan	107.184.954.474	538.581.765.581
27	Kab. Dairi	57.194.312.689	338.762.795.250
28	Kab. Deli Serdang	128.027.109.250	896.684.966.888
29	Kab. Karo	73.283.299.123	425.913.210.160
30	Kab. Labuhanbatu	65.261.647.110	366.599.213.713
31	Kab. Langkat	84.586.646.508	590.707.361.952
32	Kab. Mandailing Natal	62.472.691.233	581.433.298.981
33	Kab. Nias	39.567.542.173	297.258.018.067
34	Kab. Simalungun	82.239.185.485	761.846.237.847
35	Kab. Tapanuli Selatan	252.424.458.544	217.412.547.502
36	Kab. Tapanuli Tengah	52.230.841.823	345.468.170.076
37	Kab. Tapanuli Utara	61.179.342.590	423.400.456.226
38	Kab. Toba Samosir	63.815.379.309	387.513.909.310

39	Kota Binjai	50.084.799.437	161.446.114.793
40	Kota Medan	196.041.799.241	1.092.801.713.181
41	Kota Pematang Siantar	48.895.135.390	147.681.923.675
42	Kota Sibolga	60.090.217.770	138.724.121.105
43	Kota Tanjung Balai	34.853.089.488	179.137.351.064
44	Kota Tebing Tinggi	89.993.263.222	138.432.731.437
45	Kota Padang Sidempuan	43.970.638.158	193.871.073.576
46	Kab. Pakpak Bharat	26.613.736.557	184.943.189.153
47	Kab. Nias Selatan	33.264.467.423	582.028.193.393
48	Kab. Humbang Hasundutan	58.195.786.327	313.247.662.777
49	Kab. Serdang Bedagai	51.705.938.479	496.614.480.516
50	Kab. Samosir	37.101.481.259	274.330.922.672
51	Kab. Batu Bara	51.960.803.895	352.102.713.943
52	Kab. Padang Lawas	40.030.666.431	444.295.388.442
53	Kab. Padang Lawas Utara	43.479.670.434	465.446.134.780
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	49.569.662.099	254.736.124.118
55	Kab. Labuhanbatu Utara	47.229.442.913	266.830.793.320
56	Kab. Nias Utara	26.650.790.683	341.108.224.025
57	Kab. Nias Barat	279.029.882.071	60.279.604.089
58	Kota Gunungsitoli	34.638.939.662	-
59	Provinsi Sumatera Barat	433.371.632.019	2.140.619.447.910
60	Kab. Limapuluh Kota	92.745.792.758	301.899.480.475
61	Kab. Agam	55.166.763.221	360.795.949.181
62	Kab. Kepulauan Mentawai	79.593.129.499	195.853.260.006
63	Kab. Padang Pariaman	64.340.752.256	328.749.716.009
64	Kab. Pasaman	62.000.619.925	240.453.769.511
65	Kab. Pesisir Selatan	74.455.375.004	428.529.914.028
66	Kab. Sijunjung	50.707.746.725	261.201.509.426
67	Kab. Solok	82.580.569.732	307.604.932.659
68	Kab. Tanah Datar	57.210.617.592	321.188.625.287
69	Kota Bukit Tinggi	46.909.665.612	166.905.302.182
70	Kota Padang Panjang	31.758.194.030	133.516.705.546
71	Kota Padang	261.467.976.864	345.806.779.927
72	Kota Payakumbuh	55.988.768.744	156.010.534.561
73	Kota Sawahlunto	21.001.937.568	192.491.401.996
74	Kota Solok	53.489.427.807	236.045.301.354
75	Kota Pariaman	45.025.472.930	204.102.992.270
76	Kab. Pasaman Barat	71.318.511.717	263.781.756.005
77	Kab. Dharmasraya	67.472.784.421	241.293.808.550
78	Kab. Solok Selatan	40.750.107.791	253.577.418.586
79	Provinsi Riau	451.636.166.645	2.879.144.441.888
80	Kab. Bengkalis	221.492.510.212	878.913.327.809
81	Kab. Indragiri Hilir	124.019.497.301	672.706.215.557

82	Kab. Indragiri Hulu	84.420.324.423	249.024.722.868
83	Kab. Kampar	123.796.474.252	597.134.689.988
84	Kab. Kuantan Singingi	50.940.195.550	473.250.038.785
85	Kab. Pelalawan	96.210.442.101	476.434.669.612
86	Kab. Rokan Hilir	92.466.907.835	425.097.400.960
87	Kab. Rokan Hulu	82.351.261.431	442.631.879.209
88	Kab. Siak	101.177.263.314	495.281.405.236
89	Kota Dumai	91.760.511.628	232.890.323.334
90	Kota Pekanbaru	210.185.727.849	455.559.402.846
91	Kab. Kepulauan Meranti	70.816.985.478	350.285.296.563
92	Provinsi Jambi	285.572.962.242	1.105.479.725.397
93	Kab. Batanghari	65.732.534.110	418.591.215.359
94	Kab. Bungo	64.537.586.279	389.191.253.287
95	Kab. Kerinci	82.945.049.804	451.555.165.247
96	Kab. Merangin	62.756.441.655	476.731.874.056
97	Kab. Muaro Jambi	53.264.059.758	388.759.104.607
98	Kab. Sarolangun	133.040.488.796	285.030.013.783
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	67.742.004.083	389.415.620.749
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	120.600.102.235	282.295.843.269
101	Kab. Tebo	37.806.842.247	304.729.109.884
102	Kota Jambi	89.313.937.200	296.407.052.134
103	Kota Sungai Penuh	48.256.900.743	214.735.512.188

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

BELANJA MENURUT FUNGSI PADA REALISASI APBD 2018*Per 5 September 2019**Jumlah: 541 daerah*

No.	Nama Pemda	Fungsi Ekonomi	Fungsi Pelayanan Umum
1	Provinsi Aceh	1.451.531.045.172	1.712.049.302.310
2	Kab. Aceh Barat	84.859.343.514	427.062.718.378
3	Kab. Aceh Besar	97.668.112.537	739.241.552.565
4	Kab. Aceh Selatan	82.318.786.255	485.394.192.439
5	Kab. Aceh Singkil	64.013.018.683	135.523.897.921
6	Kab. Aceh Tengah	63.604.167.219	439.565.657.670
7	Kab. Aceh Tenggara	48.871.133.854	562.937.023.247
8	Kab. Aceh Timur	59.155.484.735	711.426.341.841
9	Kab. Aceh Utara	74.942.931.138	918.602.581.277
10	Kab. Bireuen	75.719.906.002	725.700.775.095
11	Kab. Pidie	79.452.803.458	785.499.181.609
12	Kab. Simeulue	67.180.331.048	307.985.528.752
13	Kota Banda Aceh	85.467.816.851	332.046.755.216
14	Kota Sabang	49.284.886.171	161.861.353.738
15	Kota Langsa	33.704.450.385	254.746.674.983
16	Kota Lhokseumawe	27.932.698.911	275.181.925.466
17	Kab. Gayo Lues	57.957.165.014	377.933.342.665
18	Kab. Aceh Barat Daya	61.398.623.784	279.710.208.220
19	Kab. Aceh Jaya	68.889.006.052	310.977.656.485
20	Kab. Nagan Raya	55.093.274.820	375.525.731.708
21	Kab. Aceh Tamiang	57.345.348.628	418.749.496.269
22	Kab. Bener Meriah	51.644.051.558	366.140.206.762
23	Kab. Pidie Jaya	62.427.038.549	655.228.737.021
24	Kota Subulussalam	45.377.619.390	219.914.364.697
25	Provinsi Sumatera Utara	765.288.884.228	4.172.024.996.994
26	Kab. Asahan	97.524.383.970	511.145.870.331
27	Kab. Dairi	49.030.537.474	349.161.413.214
28	Kab. Deli Serdang	137.372.852.979	938.429.745.689
29	Kab. Karo	80.458.948.016	448.035.079.884
30	Kab. Labuhanbatu	54.839.854.468	361.104.147.113
31	Kab. Langkat	56.101.472.368	649.733.732.156
32	Kab. Mandailing Natal	75.831.152.223	554.725.712.851
33	Kab. Nias	44.669.094.888	328.586.497.502
34	Kab. Simalungun	88.090.000.785	668.451.888.776
35	Kab. Tapanuli Selatan	151.695.569.892	371.316.263.897
36	Kab. Tapanuli Tengah	49.340.760.121	357.583.368.849
37	Kab. Tapanuli Utara	75.590.934.874	422.504.358.250

38	Kab. Toba Samosir	71.698.380.733	372.508.873.252
39	Kota Binjai	64.417.164.880	185.894.255.240
40	Kota Medan	213.655.945.948	1.123.909.513.546
41	Kota Pematang Siantar	55.111.335.435	109.378.022.568
42	Kota Sibolga	60.234.182.476	157.821.783.064
43	Kota Tanjung Balai	37.096.701.142	175.688.250.000
44	Kota Tebing Tinggi	49.049.873.753	134.173.198.973
45	Kota Padang Sidempuan	48.171.245.282	226.231.610.121
46	Kab. Pakpak Bharat	26.473.786.107	180.237.243.977
47	Kab. Nias Selatan	38.504.474.415	686.626.029.398
48	Kab. Humbang Hasundutan	60.702.268.211	295.241.750.567
49	Kab. Serdang Bedagai	60.087.140.581	498.370.958.494
50	Kab. Samosir	34.416.850.730	260.470.874.635
51	Kab. Batu Bara	55.185.357.345	344.212.336.480
52	Kab. Padang Lawas	39.988.313.678	430.014.323.586
53	Kab. Padang Lawas Utara	46.407.477.076	454.195.872.345
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	47.803.611.332	258.748.453.266
55	Kab. Labuhanbatu Utara	52.243.994.711	270.475.524.081
56	Kab. Nias Utara	38.497.449.011	384.956.283.839
57	Kab. Nias Barat	28.962.475.431	329.326.482.221
58	Kota Gunungsitoli	28.950.610.934	-
59	Provinsi Sumatera Barat	495.599.379.726	2.179.103.174.157
60	Kab. Limapuluh Kota	89.169.427.952	294.079.617.144
61	Kab. Agam	78.474.924.520	341.119.480.528
62	Kab. Kepulauan Mentawai	81.901.922.792	285.505.654.233
63	Kab. Padang Pariaman	70.554.722.315	250.933.634.900
64	Kab. Pasaman	65.259.086.594	250.582.482.825
65	Kab. Pesisir Selatan	103.431.520.018	441.503.751.555
66	Kab. Sijunjung	54.072.674.834	293.232.607.743
67	Kab. Solok	67.762.278.418	318.404.332.621
68	Kab. Tanah Datar	62.648.036.114	354.852.723.777
69	Kota Bukit Tinggi	40.851.398.432	251.103.147.143
70	Kota Padang Panjang	41.600.313.327	161.194.394.345
71	Kota Padang	110.882.735.435	304.787.818.815
72	Kota Payakumbuh	60.614.687.459	168.852.298.048
73	Kota Sawahlunto	20.125.469.167	205.773.963.192
74	Kota Solok	53.526.407.438	276.659.310.874
75	Kota Pariaman	50.510.276.119	205.564.018.364
76	Kab. Pasaman Barat	59.208.126.457	245.713.318.607
77	Kab. Dharmasraya	85.312.148.097	269.473.136.274
78	Kab. Solok Selatan	39.718.581.605	203.981.369.401
79	Provinsi Riau	421.360.380.210	2.795.560.905.893
80	Kab. Bengkalis	194.636.155.684	951.063.444.191

81	Kab. Indragiri Hilir	105.211.366.726	613.268.603.802
82	Kab. Indragiri Hulu	76.391.432.515	468.641.221.561
83	Kab. Kampar	104.058.517.804	641.496.340.310
84	Kab. Kuantan Singingi	42.884.543.904	465.136.167.076
85	Kab. Pelalawan	76.110.200.035	447.233.478.737
86	Kab. Rokan Hilir	76.851.755.009	524.465.023.677
87	Kab. Rokan Hulu	75.446.870.936	426.373.312.130
88	Kab. Siak	109.533.043.789	556.740.858.740
89	Kota Dumai	92.368.258.987	235.180.107.698
90	Kota Pekanbaru	204.819.684.350	505.602.376.147
91	Kab. Kepulauan Meranti	84.591.693.848	372.332.871.863
92	Provinsi Jambi	316.567.799.202	1.165.578.096.098
93	Kab. Batanghari	70.550.790.109	443.537.933.782
94	Kab. Bungo	68.902.180.159	413.245.013.883
95	Kab. Kerinci	72.178.660.046	422.750.503.436
96	Kab. Merangin	63.093.654.217	464.748.476.459
97	Kab. Muaro Jambi	50.777.515.481	386.127.513.404
98	Kab. Sarolangun	137.966.261.355	273.830.502.455
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	75.287.422.662	397.760.279.367
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	123.466.593.504	297.840.701.712
101	Kab. Tebo	38.217.736.829	317.797.021.598
102	Kota Jambi	87.614.416.986	321.742.966.602
103	Kota Sungai Penuh	52.363.072.902	234.805.073.639

Sumber: APBD Dirjen Perimbangan Keuangan

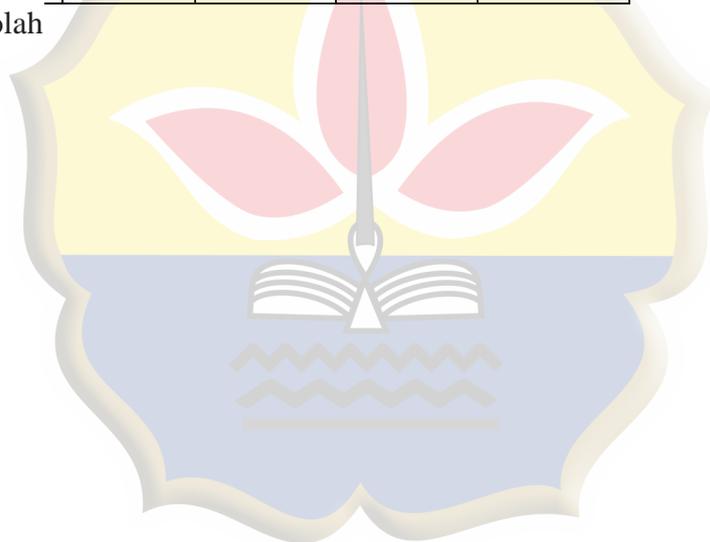
Lampiran 3

Hasil data Logaritma Natural Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum.

Kabupaten/kota	Tahun	Ln_PE	Ln_PPBE	Ln_PPBU
Kerinci	2014	2,203869	25,02716	30,5787
Kerinci	2015	1,86408	24,82745	25,61805
Kerinci	2016	1,902108	23,2812	24,71344
Kerinci	2017	1,796747	25,14144	26,83596
Kerinci	2018	1,629241	25,00241	26,77005
Merangin	2014	1,964311	29,95957	30,76051
Merangin	2015	1,701105	24,98054	25,91465
Merangin	2016	1,826161	25,27831	26,65027
Merangin	2017	1,713798	24,87834	26,89022
Merangin	2018	1,642873	24,86789	26,86476
Sarolangun	2014	1,648659	29,88588	30,69131
Sarolangun	2015	1,128171	23,79865	24,94687
Sarolangun	2016	1,449269	25,01561	26,26003
Sarolangun	2017	1,545433	25,61392	26,37586
Sarolangun	2018	1,551809	25,65028	26,33578
Batanghari	2014	2,022871	29,70874	30,70768
Batanghari	2015	1,472472	24,73978	25,74678
Batanghari	2016	1,515127	25,37051	27,5283
Batanghari	2017	1,572774	24,90886	26,76016
Batanghari	2018	1,601406	24,9796	26,81805
Muaro jambi	2014	2,083185	29,64156	30,71708
Muaro jambi	2015	1,656321	24,39777	25,56111
Muaro jambi	2016	1,691939	22,74342	24,23919
Muaro jambi	2017	1,621366	24,69853	26,68623
Muaro jambi	2018	1,66203	24,65072	26,67943
Tanjabt	2014	1,759581	30,41413	30,73169
Tanjabt	2015	0,625938	25,30195	25,80933
Tanjabt	2016	0,993252	25,23973	26,01144
Tanjabt	2017	1,141033	25,51575	26,36622
Tanjabt	2018	1,141033	25,53924	26,41982
Tanjabbar	2014	1,766442	30,41916	30,99221
Tanjabbar	2015	1,381282	25,39103	26,02766
Tanjabbar	2016	1,144223	25,04078	26,41091
Tanjabbar	2017	1,446919	24,93897	26,68791
Tanjabbar	2018	1,930071	25,04458	26,70912
Tebo	2014	2,178155	29,72736	30,20844
Tebo	2015	1,663926	24,54337	25,63866

Tebo	2016	1,682688	25,90334	26,43062
Tebo	2017	1,722767	24,35576	26,44269
Tebo	2018	1,61343	24,36657	26,48468
Bungo	2014	1,90806	30,18463	30,82102
Bungo	2015	1,635106	25,20073	25,99075
Bungo	2016	1,648659	25,05035	26,4336
Bungo	2017	1,735189	24,89051	26,68734
Bungo	2018	1,551809	24,95595	26,74731
Kota Jambi	2014	2,100469	29,96863	30,7455
Kota Jambi	2015	1,715598	24,94404	25,93495
Kota Jambi	2016	1,918392	25,1577	26,23187
Kota Jambi	2017	1,543298	25,21542	26,415
Kota Jambi	2018	1,701105	25,19621	26,49702
Kota Sungai Penuh	2014	2,020222	29,52996	30,37871
Kota Sungai Penuh	2015	1,954445	24,7432	25,54029
Kota Sungai Penuh	2016	1,873339	24,85014	26,0701
Kota Sungai Penuh	2017	1,83098	24,5998	26,09267
Kota Sungai Penuh	2018	1,711995	24,68147	26,18202

Sumber: Data diolah



Lampiran 4

Hasil Estimasi *Common Effect* Model menggunakan Program Eviews 8.

Dependent Variable: LN_PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/09/20 Time: 21:09

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

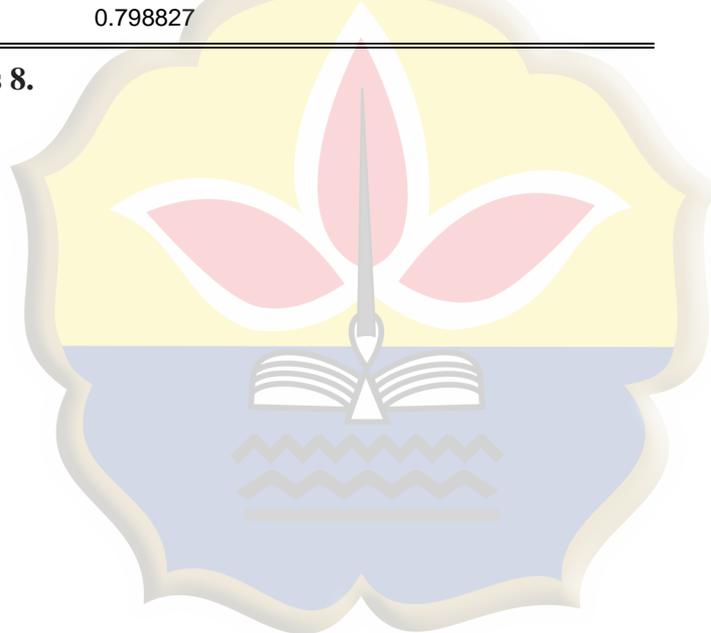
Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PPBE?	-0.071635	0.044829	-1.597982	0.1160
LN_PPBU?	0.129623	0.042700	3.035667	0.0037

R-squared	0.268917	Mean dependent var	1.663755
Adjusted R-squared	0.255123	S.D. dependent var	0.296159
S.E. of regression	0.255604	Akaike info criterion	0.145311
Sum squared resid	3.462670	Schwarz criterion	0.218305
Log likelihood	-1.996057	Hannan-Quinn criter.	0.173539
Durbin-Watson stat	0.798827		

Sumber: Eviews 8.



Lampiran 5

Hasil Estimasi *Fixed Effect* Model menggunakan Program Eviews 8.

Dependent Variable: LN_PE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/09/20 Time: 21:12

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LN_PPBE?	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846
LN_PPBU?	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	0.276038			
_MERANGIN--C	0.089448			
_SAROLANGUN--C	-0.201637			
_BATANGHARI--C	-0.043566			
_MUARJAMBI--C	0.116644			
_TANJABTIM--C	-0.557403			
_TANJABBAR--C	-0.153141			
_TEBO--C	0.112543			
_BUNGO--C	0.014840			
_KOTAJAMBI--C	0.117789			
_SUNGAIPENUH--C	0.228446			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.786149	Mean dependent var	2.255480	
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var	0.949327	
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid	1.055024	
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat	2.118729	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.764842	Mean dependent var	1.663755	
Sum squared resid	1.113795	Durbin-Watson stat	2.057426	

Sumber: Eviews 8.

Lampiran 6

Hasil Estimasi *Random Effect Model* menggunakan Program Eviews 8.

Dependent Variable: LN_PE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/09/20 Time: 21:13

Sample: 2014 2018

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.535134	0.327718	-1.632907	0.1085
LN_PPBE?	0.000329	0.032248	0.010197	0.9919
LN_PPBP?	0.080757	0.034459	2.343561	0.0230
Random Effects (Cross)				
_KERINCI--C	0.197180			
_MERANGIN--C	0.069383			
_SAROLANGUN--C	-0.154349			
_BATANGHARI--C	-0.049172			
_MUAROJAMBI--C	0.090663			
_TANJABTIM--C	-0.445035			
_TANJABBAR--C	-0.126295			
_TEBO--C	0.097154			
_BUNGO--C	0.012463			
_KOTAJAMBI--C	0.108526			
_SUNGAIPENUH--C	0.199482			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.167511	0.5197
Idiosyncratic random			0.161020	0.4803
Weighted Statistics				
R-squared	0.452255	Mean dependent var		0.657081
Adjusted R-squared	0.431188	S.D. dependent var		0.224060
S.E. of regression	0.168986	Sum squared resid		1.484917
F-statistic	21.46732	Durbin-Watson stat		1.529445
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.244561	Mean dependent var		1.663755
Sum squared resid	3.578028	Durbin-Watson stat		0.634735

Sumber: Eviews 8.

Lampiran 7

Hasil Uji Chow untuk memelih antara metode Common Effect Model dan Fied Effect Model.

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.362623	(10,42)	0.0000

Sumber: Eviews 8.



Lampiran 8

Hasil Uji Hausman untuk memelih antara metode Random Effect Model dan Fied Effect Model

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.272081	2	0.0264

Sumber: Eviews 8.



Lampiran 9 Hasil Regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.307939	0.242657	-1.269031	0.2114
LN_PPBE?	0.046829	0.026514	1.766245	0.0846***
LN_PPBP?	0.028119	0.029508	0.952926	0.3461***
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.276038			
_MERANGIN—C	0.089448			
_SAROLANGUN—C	-0.201637			
_BATANGHARI—C	-0.043566			
_MUAROJAMBI—C	0.116644			
_TANJABTIM—C	-0.557403			
_TANJABBAR—C	-0.153141			
_TEBO—C	0.112543			
_BUNGO—C	0.014840			
_KOTAJAMBI—C	0.117789			
_SUNGAIPENUH—C	0.228446			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.786149	Mean dependent var	2.255480	
Adjusted R-squared	0.725048	S.D. dependent var	0.949327	
S.E. of regression	0.158492	Sum squared resid	1.055024	
F-statistic	12.86652	Durbin-Watson stat	2.118729	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.764842	Mean dependent var	1.663755	
Sum squared resid	1.113795	Durbin-Watson stat	2.057426	

Sumber: *Eviews 8.*